

MODUL PELATIHAN

Transformasi Digital di Kemendikbudristek



Disusun oleh:

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Sekretariat Jenderal**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2024**

PELATIHAN LITERASI DIGITAL
TRANSFORMASI DIGITAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI



TIM PUSDIKLAT

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
2023

Hak Cipta © Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek
Edisi Tahun 2023

Modul

Pelatihan Literasi Digital

Penanggung Jawab: Dr.Ir. Mustangimah, M.Si.

Ketua: Dewi Andayani, S.E., AK, MAB

Penyusun:

Tim Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek

Editor: Tim Media Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek

Tata Letak: Tim Media Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek

Depok – Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek – 2023

21 + ii hlm: 21 x 29,7 cm

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Raya Ciputat-Parung Km. 19, Bojongsari, Depok 16517
Telepon (021) 7490411 Laman: <http://pusdiklat.kemdikbud.go.id>

KATA PENGANTAR

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja membawa perubahan yang signifikan dalam manajemen kepegawaian di Indonesia, termasuk pengembangan kompetensi pegawai. Pengembangan kompetensi ASN yang merupakan hak pegawai ASN harus didasarkan pada kebutuhan instansi dan kebutuhan nasional yang dijabarkan dari Prioritas Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam visi, misi, kebijakan, dan strategi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia telah membawa dampak dan memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif, ASN yang harus lebih cepat adaptif dan dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, hal ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi ASN untuk bekerja secara profesional dan maksimal dalam pelayanan masyarakat. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah terjadi, ASN diharapkan dapat bertransformasi ke arah paradigma baru dalam pelayanan publik dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin. Oleh karena itu, ASN harus terus mengembangkan kompetensinya.

Wadah Wiyata Kinarya Merdeka Belajar (WKMB) dapat dimanfaatkan sebagai momentum dalam pengembangan kompetensi dan inovasi. Untuk meningkatkan kompetensi ASN secara teknis dalam menghadapi tugas fungsi salah satu langkah melalui pelatihan. Ada 4 (empat) materi yang akan disajikan sebagai bahan pembelajaran yaitu: 1) Konfigurasi Tata Kelola Big Data Pendidikan; 2) Program Internal Kemendikbudristek Berbasis Data Pendidikan; 3) Integrasi Dapodik dengan Kementerian dan Lembaga Lain; dan 4) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendikbudristek.

Materi-materi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menjawab lingkup tugas, fungsi dan jabatannya yang menuntut dapat berinovasi, berkreasi, beradaptasi, berkontribusi, berkolaborasi dan menerapkan kompetensi yang dimiliki di lingkungan kerja dan dunia secara luas yang saat ini lingkungan tersebut berubah demikian cepat dan semakin kompleks.

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada seluruh tim penyusun, semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, waktu dan tenaga.

Semoga bahan ajar ini dapat menjadi salah satu referensi yang dapat memperkuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

Kami merasa masih banyak lagi yang harus dilakukan agar bahan pembelajaran ini memenuhi kebutuhan peserta pelatihan. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan adanya tanggapan berupa kritik dan saran perbaikan.

Depok, Maret 2023
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kepala,

Ttd.

Dr. Ir. Mustangimah, M.Si.
NIP 196405241992032001

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
PETUNJUK BELAJAR	vii
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DESKRIPSI SINGKAT.....	5
C. HASIL BELAJAR	5
D. INDIKATOR HASIL BELAJAR	5
E. MATERI	6
KONFIGURASI TATA KELOLA BIG DATA PENDIDIKAN	7
A. INDIKATOR HASIL BELAJAR	7
B. KONSEP KONFIGURASI TATA KELOLA BIG DATA PENDIDIKAN	7
C. BAGAIMANA KONFIGURASI TATA KELOLA BIG DATA PENDIDIKAN	10
1. MENGAPA MERDEKA BELAJAR?	13
2. EPISODE MERDEKA BELAJAR	15
3. DIGITALISASI PENDIDIKAN (STATUS PER-10 MARET 2023).....	20
PROGRAM INTERNAL KEMENDIKBUDRISTEK BERBASIS DATA PENDIDIKAN	22
A. INDIKATOR HASIL BELAJAR	22
B. PROGRAM INTERNAL KEMENDIKBUDRISTEK BERBASIS DATA PENDIDIKAN	22
1. Layanan Program Prioritas Kemendikbudristeka. Informasi Merdeka Belajar 22	
2. Layanan Informasi Publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	23
3. Layanan untuk Peserta Didik (Siswa dan Mahasiswa)	23
4. Layanan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Guru dan Dosen).....	24
5. Layanan diperuntukkan untuk Orang Tua.....	24
6. Layanan diperuntukkan untuk Satuan Pendidikan	24
7. Layanan untuk Kebudayaan dan Bahasa.....	25
8. Layanan untuk Pemerintah Daerah	25
9. Layanan untuk Masyarakat dan Mitra.....	25
INTEGRASI DATA POKOK PENDIDIKAN DENGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LAIN .	27

A. INDIKATOR HASIL BELAJAR	27
B. PERENCANAAN BERBASIS DATA	27
C. IDENTIFIKASI, REFLEKSI DAN BENAHI PADA SATUAN PENDIDIKAN	44
D. RKAS.....	49
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENDIKBUDRISTEK .	79
A. INDIKATOR HASIL BELAJAR	79
B. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE).....	79
1. <i>E-Government</i> sebagai Langkah untuk Mencapai efektifitas Pelayanan Publik.....	81
2. Kebijakan terkait Pelayanan Publik Digital	83
PENUTUP	87
DAFTAR PUSTAKA	89

PETUNJUK BELAJAR

Dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dan hasil belajar dapat dicapai oleh peserta secara optimal, berikut beberapa petunjuk penggunaan Modul Pelatihan. Modul ini terdiri dari enam bab dan masing-masing bab ada yang saling tidak berkaitan. Diharapkan peserta dapat membaca secara sistematis dan sesuai kronologis agar terbangun pemahaman yang komprehensif.

1. Cermati dari masing-masing isi dari modul ini.
2. Catat poin-poin penting dari materi pokok dan sub materi pokok dalam modul ini.
3. Latihan dan evaluasi dari modul ini merupakan bagian terkecil dari alat ukur untuk mengukur keberhasilan peserta dalam pembelajaran dari masing-masing materi dan sub materi.
4. Penyampaian modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa yang berfokus pada eksplorasi pengetahuan dan pengalaman, diharapkan dengan eksplorasi ini peserta dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran sesuai konteks, pertukaran pengalaman antar dengan peserta lain. Hal ini akan menjadi sangat berharga pada saat aktualisasi di satuan kerja masing-masing untuk bersama-sama membangun *good governance* di lingkungan Kemendikbudristek.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Paradigma baru reformasi birokrasi selalu berubah dan berkembang dengan cepat sesuai tuntutan dan perkembangan. Pengembangan kompetensi menjadi *conditio sine qua non* dalam meningkatkan kualitas ASN untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia dan Indonesia Emas 2045. Perkembangan dunia VUCA dan *triple disruption* mulai dari Era Milenial, Revolusi 4.0, sampai dengan Pandemi Covid-19 menuntut birokrasi khususnya ASN untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat dan dinamis, maka kompetensi dan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan, agar dapat mengikuti dan mengakomodasi perkembangan tersebut dengan baik dan benar.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan dan memberikan hak kepada ASN dalam pengembangan kompetensi. Untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN, upaya menginisiasi untuk menjawab lingkup sektor publik perlu dan penting untuk mengubah *mindset* terhadap pemahaman mengenai pengembangan ASN ke depan. ASN harus dipandang sebagai investasi berharga bagi instansinya bahkan bagi pemerintah secara umum. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pengembangan kompetensi perlu ditetapkan secara matang menuju pembelajaran berpusat pada pembelajar itu sendiri.

Trasformasi digital di lingkungan Kemendikbudristek merupakan suatu keniscayaan. Pelayanan publik yang berbasis digital untuk memberikan jawaban atas tuntutan para pemangku kepentingan sudah menjadi suatu keharusan.

Zaman VUCA. ASN dihadapkan pada suatu zaman, segala hal bisa berubah dengan cepat, dinamis atau diungkapkan dengan istilah zaman VUCA (*volatillity, uncertainty, complexity, dan ambiguity*). Istilah VUCA berasal dari United States Army War College untuk menggambarkan kondisi akibat perang dingin. Namun karena kesamaan makna, maka istilah VUCA kini diadopsi oleh dunia bisnis dan sektor publik.

Volatility istilah yang menggambarkan dunia berubah begitu cepat, bergejolak, tidak stabil dan tidak terduga.

Uncertainty menggambarkan kondisi masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sejarah dan pengalaman masa lalu tidak lagi relevan memprediksi probabilitas dan sesuatu yang akan terjadi.

Complexity, dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Masalah dan akibat lebih berlapis, dan saling memengaruhi. Situasi eksternal yang dihadapi akan semakin rumit.

Ambiguity yang menggambarkan lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. Setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi.

Sejalan dengan zaman VUCA yang belum usai, ASN di Indonesia dihadapkan pada 3 (tiga) tantangan disrupti yakni digital disruption, milenial disruption, dan pandemic disruption. Ketiga disrupti tersebut akan menggerus cara-cara dan kebiasaan-kebiasaan konvensional.

Disrupti digital adalah zaman terjadinya inovasi dan perubahan secara besar-besaran dan fundamental karena boomingnya teknologi digital, sehingga mengubah sistem yang terjadi di semua sektor dan lini yang ada di Indonesia maupun global. Perkembangan teknologi digital secara cepat dan masif telah mampu menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Platform digital mampu mengubah produksi, distribusi dan iklan di media. Kehadiran disrupti digital dipengaruhi dengan revolusi industri 4.0 yang mengedepankan teknologi informasi (*Internet of Things, Artificial Intelligence, Cloud Computing* dan Big Data).

Kemajuan teknologi telah mengubah tatanan kerja, karena cepat atau lambat pasti sektor publik di lingkungan Kemendikbudristek pun akan terkena dampaknya.

Transformasi digital di sektor publik di lingkungan Kemendikbudristek menjadi tuntutan masyarakat untuk terus mendorong terjadinya perubahan ke arah digitalisasi.

Tantangan lain yang dihadapi ASN di Indonesia pada saat ini adalah milenial disruption. Hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia 25,87% merupakan generasi milenial, 27,94% generasi Z dan 10,88% generasi post generasi Z. Generasi ini sangat lekat dengan teknologi informasi dan komunikasi dan sering kali diasumsikan sebagai disruptor melalui keterhubungan dengan internet sehingga mempengaruhi pola pikir, nilai dan perilaku yang dianut. Mereka adalah tipe-tipe orang yang multitasking, menyukai kehidupan yang dinamis dan bergerak cepat. Di sisi lain, kondisi saat ini di sektor publik masih didominasi oleh kelompok usia 51 – 60 tahun. Dengan adanya hal tersebut, maka akan menjadi tantangan bagi sektor publik untuk melakukan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena akan berhadapan dengan kaum milenial yang kritis dan berekspektasi tinggi.

Tantangan lainnya yang dihadapi adalah adanya pandemi covid 19. Adanya pandemi ini merubah seluruh tatanan kehidupan termasuk pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Pandemi Covid-19 memicu adanya perubahan kultur dan mindset, dampak dari perubahan kultur tersebut sangat memicu kreatifitas dan inovasi anggota organisasi yang ada di dalam instansi tersebut. Saat ini, mayoritas penyelenggara pada sektor publik mau tidak mau suka tidak suka harus mengikuti dan memanfaatkan teknologi sebagai media komunikasi dan informasi yang efektif di masa pandemi. Misal perubahan mekanisme kerja yang sebelumnya berorientasi di kantor, kemudian perlahan mulai berubah menjadi bekerja rumah (*work from home*) atau *flexible working arrangement*. Kendalanya adalah ketika sektor publik gamang teknologi, dan jengah dengan keterpaksaan, maka esensi melayani masyarakat akan semakin hilang karena terkungkung dengan beban. Yang perlu ditekankan bahwa bukanlah seberapa canggih perangkat yang digunakan, akan tetapi seberapa besar keinginan ASN untuk menyesuaikan pada tatanan baru. Selain itu persoalannya bukanlah sekadar kebijakan, tapi terlebih pada komitmen ASN dan organisasi sektor publik untuk mengubah *mind set* dan belajar hal baru.

Di era penuh ketidakpastian dan era digital seperti saat sekarang, tidak hanya lingkungan kerja dan sistem sebuah organisasi yang dituntut untuk *agile*, akan tetapi individu ASN didalamnya juga perlu dikembangkan agar memiliki kemampuan learning agility agar dapat memenuhi tuntutan organisasi akan SDM yang agile. Kenapa learning *agility*? Karena hanya individu ASN yang mau dan cepat mengembangkan kompetensinya yang dapat memastikan organisasi mampu

beradaptasi dalam setiap perubahan. Sehingga sebuah organisasi bisa *agile* atau tidak tergantung pada *learning agility* individu ASNnya.

Individu ASN dengan *agility* yang tinggi mengambil pelajaran yang tepat dari pengalaman mereka dan menerapkan pelajaran tersebut disituasi-situasi baru, mereka cenderung akan mencari tantangantantangan baru terus menerus, aktif mencari *feedback* dari orang lain dengan tujuan untuk bertumbuh dan berkembang, cenderung merefleksi diri, dan mengevaluasi pengalaman dan menarik kesimpulan. *Learning agility* terbagi dalam empat dimensi yaitu: 1). *People agility*:sejauh mana ASN mengetahui dirinya dengan baik, belajar dari pengalaman, memperlakukan orang lain secara konstruktif dan resilien dalam tekanan perubahan; 2). *Results agility*: sejauh mana ASN yang mendapatkan hasil di bawah kondisi yang sulit, menginspirasi orang lain, dan membangun kepercayaan diri orang lain dengan kehadirannya; 3). *Mental agility*: sejauh mana ASN berpikir tentang suatu masalah dari sudut pandang yang baru dan merasa nyaman dengan ambiguitas, kompleksitas dan menjelaskan pemikiran mereka kepada orang lain; 4) *Change agility*: tingkat yang mana ASN ingin tahu, memiliki gairah atas ide-ide dan terlibat dalam aktivitas pengembangan keterampilan. Tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi ASN pada kondisi saat ini, *learning agility* juga mengakuisisi kompetensi yang belum dibutuhkan akan tetapi relevan dengan kompetensi yang akan dibutuhkan pada masa depan serta mengaplikasikan kompetensi baru tersebut mulai dari sekarang dalam bentuk pola kerja yang berbeda dari sebelumnya. Sebagai gambaran, *learning agility* juga menjadi faktor penilaian dalam *talent committee* dan memiliki bobot sama besarnya dengan asesmen kompetensi. Nantinya *talent commite* mengklasifikasi talenta berdasarkan tiga variabel yakni kinerja, kompetensi dan *learning agility*.

Merujuk pada kompetensi dan kemampuan yang harus dimiliki oleh ASN, baik dalam setiap perkembangan dari segi keilmuan yang terjadi saat ini maupun peraturan perundang-undangan dan kebijakan maka Kemendikbudristek menyelenggarakan Pelatihan Literasi Digital bagi pegawai ASN di lingkungan Kemendikbudristek, dengan harapan para ASN dapat memahami, mengetahui, mengupdate dan menerapkan kompetensi yang diperoleh dan dimiliki pada tugas fungsi jabatannya, yang diharapkan dapat memberikan dampak kinerja pada individu dan organisasi.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Bahan ajar pelatihan ini menyajikan tentang konfigurasi tata kelola big data pendidikan, program internal Kemendikbudristek yang berbasis data pendidikan, integrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Kementerian dan Lembaga lain, dan arsitektur SPBE Kemendikbudristek, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum. Pemahaman secara konsep, praktik dan simulasi penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang saat ini di kementerian untuk menunjang lingkup tugas fungsi dan jabatan ASN.

Bahan ajar ini memberikan informasi secara umum dari materi-materi yang disajikan, tetapi sumber belajar dan rujukan dan referensi lain sebagai penunjang dapat digali secara mandiri di luar yang diberikan dari bahan ajar ini.

C. HASIL BELAJAR

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu:

- 1) Menguraikan tentang konfigurasi tata kelola Big Data Pendidikan;
- 2) Menguraikan tentang program Internal Kemendikbudristek yang berbasis Data Pendidikan;
- 3) Menguraikan tentang integrasi Dapodik dengan Kementerian dan Lembaga yang lain;
- 4) Menguraikan tentang arsitektur SPBE Kemendikbudristek

D. INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan dapat memahami dan menguraikan tentang konfigurasi tata kelola big data pendidikan, menguraikan tentang program internal Kemendikbudristek yang berbasis data pendidikan, menguraikan tentang integrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Kementerian dan Lembaga lain, dan menguraikan tentang arsitektur SPBE Kemendikbudristek.

E. MATERI

1. Konfigurasi Tata Kelola Big Data Pendidikan
2. Program Internal Kemendikbudristek Berbasis Data Pendidikan
3. Integrasi Dapodik dengan Kementerian dan Lembaga Lain
4. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendikbudristek

KONFIGURASI TATA KELOLA BIG DATA PENDIDIKAN

A. INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mempelajari konfigurasi tata kelola Big Data Pendidikan peserta dapat:

1. Memahami konsep konfigurasi tata kelola Big Data Pendidikan
2. Menguraikan tentang konfigurasi tata kelola Big Data Pendidikan

B. KONSEP KONFIGURASI TATA KELOLA BIG DATA PENDIDIKAN

Makna konfigurasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk, wujud (untuk menggambarkan orang atau benda), sedangkan tata kelola adalah tata cara mengelola.

"Para ahli mengatakan bahwa big data adalah informasi digital (Agarwal & Dhar, 2014). Pada dasarnya, setiap komputer dan perangkat seluler sudah berisi informasi digital. Namun, tidak berarti secara otomatis merupakan big data. Menurut Chen, Mao, & Liu (2014), big data merupakan pengelolaan data menjadi informasi yang tepat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Jadi, berbicara tentang big data itu tidak hanya berbicara tentang mesin-nya, atau software-nya, atau informasi yang terdapat di dalam data, melainkan berbicara tentang sistem manajemen data yang lebih luas (dalam Suwanto, 2021)."

5 (lima) dimensi dari big data yaitu: *volume*, *variety*, *velocity*, *veracity* dan *value* (Power, 2014), diantaranya sebagai berikut. 1) *Volume* (jumlah) adalah sekumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan terkadang tidak terstruktur. File dari data tersebut pada umumnya berukuran sangat besar mencapai terabytes

hingga petabytes. 2) *Variety* (variasi) adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk data yang tersedia. Apabila data tradisional pada umumnya bersifat terstruktur dan mudah dianalisis, maka big data pada umumnya tidak terstruktur dan berasal dari berbagai sumber sehingga butuh diproses terlebih dahulu sebelum dianalisis. 3) *Velocity* (kecepatan) adalah kecepatan aliran penerimaan dan pemrosesan data yang sangat tinggi. 4) *Veracity* (kebenaran) adalah keakuratan data apakah dapat dipercaya atau tidak. 5) *Value* (nilai) adalah tingkat nilai, harga atau makna dari sebuah data.

Semakin besar/tinggi volume, variasi, kecepatan, tingkat kebenaran dan nilai dari data yang ada, maka semakin layak data tersebut dikategorikan sebagai big data.



(sumber gambar merdeka.com "ilustrasi big data. edu.varistor.in")

Big data bidang pendidikan adalah teknologi mampu membantu melaksanakan proses kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Salah satu contoh big data dibidang pendidikan dimanfaatkan untuk membantu pengguna diantaranya siswa, guru/dosen, orang tua dan pengguna lulusan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat.

Menurut prediksi McKinsey (dalam Suwatno, 2021) big data di masa depan akan menjadi basis utama dari setiap persaingan antar organisasi/perusahaan. Sehingga jika perusahaan tidak memanfaatkan big data untuk mendukung aktivitas bisnis mereka, kemungkinan mereka akan tergerus oleh perusahaan yang lebih menguasai data. Big data juga akan menopang gelombang baru pertumbuhan produktivitas, inovasi, dan surplus konsumen. Untuk itu, praktik administrasi perkantoran harus mampu beradaptasi dengan situasi tersebut. Pengelolaan digital office harus mampu memanfaatkan terjadinya peningkatan volume dan detail informasi yang ditangkap oleh perusahaan, kebangkitan multimedia, media sosial, dan Internet of Things. Semua itu diperkirakan akan memicu pertumbuhan eksponensial dalam data untuk masa yang akan datang.

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian dari McKinsey (dalam Suwatno, 2021) mengenai pemanfaatan big data bagi organisasi/perusahaan:

1. Data telah masuk ke setiap fungsi industri dan bisnis dan sekarang merupakan faktor penting dalam proses produksi, di samping tenaga kerja dan modal.
2. Ada lima cara dalam menggunakan big data dalam rangka menciptakan nilai.
 - a) Big data dapat membuat informasi lebih transparan dan dapat digunakan pada frekuensi yang jauh lebih tinggi.
 - b) Ketika organisasi/perusahaan membuat dan menyimpan lebih banyak data transaksional dalam bentuk digital, mereka dapat mengumpulkan informasi kinerja yang lebih akurat dan terperinci tentang segala sesuatu. Perusahaan-perusahaan terkemuka menggunakan koleksi dan analisis data untuk membuat keputusan manajemen yang lebih baik. Sementara perusahaan lainnya menggunakan big data untuk melakukan peramalan bisnis.
 - c) Big data memungkinkan segmentasi pelanggan yang semakin sempit/spesifik sehingga produk atau layanan yang dirancang lebih tepat.
 - d) Analitik canggih dapat meningkatkan pengambilan keputusan.
 - e) Big data dapat digunakan untuk meningkatkan pengembangan produk dan layanan generasi berikutnya.
3. Penggunaan big data akan menjadi dasar utama persaingan dan pertumbuhan untuk masing-masing perusahaan. Dari perspektif daya saing dan potensi perolehan nilai, semua perusahaan harus serius dalam menggunakan big data. Di sebagian besar industri, kompetitor yang sudah mapan maupun pendatang

baru akan memanfaatkan strategi berbasis data untuk berinovasi, bersaing, dan menangkap nilai dari informasi yang mendalam dan terkini.

4. Penggunaan big data akan mendukung gelombang baru pertumbuhan produktivitas dan surplus konsumen. Diperkirakan para retailer yang menggunakan big data memiliki potensi untuk meningkatkan margin operasinya hingga lebih dari 60 persen. Big data menawarkan manfaat yang cukup besar bagi konsumen serta perusahaan dan organisasi.
5. Penggunaan big data akan berpengaruh ke seluruh sektor kehidupan bisnis
6. Pengurangan SDM (talents) dalam organisasi/perusahaan agar dapat mengambil keuntungan dari efisiensi penggunaan big data.
7. Big data juga mengandung masalah yang harus diatasi, misalnya terkait dengan privasi, keamanan, kekayaan intelektual, dan sebagainya.

Organisasi atau instansi tidak hanya harus menempatkan SDM dan teknologi yang tepat, tetapi juga harus menyusun alur kerja dan insentif untuk mengoptimalkan pemanfaatan big data.

C. BAGAIMANA KONFIGURASI TATA KELOLA BIG DATA PENDIDIKAN

Pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan secara daring dalam jaringan (daring) dengan metode blended learning dan distance learning berjalan beriringan dengan proses belajar mengajar Daring di PAUD, sekolah dan juga perguruan tinggi. Survei yang dilakukan oleh Dirjen PAUD Kemendikbud terhadap 10.601 PAUD di 514 kabupaten/kota menemukan bahwa 19,3% responden menyatakan internet yang tidak stabil menjadi hambatan selama pembelajaran jarak jauh masa pandemi (Putra, 2020). Melalui Direktorat PAUD Kemendikbudristek, mengungkapkan bahwa kendala internet tak hanya terjadi di daerah terpencil, tapi juga di kota-kota besar di Indonesia (Putra, 2020). Temuan survei ini, meskipun berbeda dalam hal unit analisis, bisa digunakan untuk melihat kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh Indonesia secara umum.

Internet yang tidak stabil merupakan kendala dalam hal teknis pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, akan tetapi penting pula untuk diketahui bahwa akses internet di Indonesia belum merata. Menurut hasil survei APJII (2020) penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7 % dari total populasi. Di urutan teratas, wilayah Pulau Jawa menyumbang 41,7% dari total 73,3% pengguna internet di seluruh Indonesia, dan di urutan terbawah ada wilayah Maluku dan Papua yang

menyumbang 2,2% (APJII, 2020). Data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pengguna internet di Indonesia berada di wilayah Pulau Jawa.

Hasil penelitian Abrar dan Handoyo (2020) di Jawa Timur menemukan beberapa karakteristik dari individu yang berpeluang besar menjadi pengguna jasa internet, e-commerce, dan e-banking. Individu yang berpeluang menggunakan ketiga jasa tersebut secara sekaligus memiliki karakteristik: berusia muda, tamatan perguruan tinggi, punya ponsel, menggunakan komputer, bekerja, pengeluaran perkapita tinggi, tinggal di kota dan mempunyai infrastruktur telekomunikasi yang memadai (Abrar dan Handoyo, 2020). Dari penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kecenderungan pengguna internet masih didominasi oleh anak muda yang bekerja dan tinggal di kota. Hasil penelitian di atas menarik jika dikaitkan dengan temuan Bank Dunia. Bank Dunia mencatat di Indonesia ada kesenjangan koneksi internet bagi pengguna dewasa berusia 15 tahun ke atas di daerah perkotaan dan perdesaan (World Bank Group, 2021). Di perkotaan, masyarakat berusia dewasa yang menikmati internet berjumlah 62%, dan di perdesaan pada kategori yang sama berjumlah 36% (World Bank Group, 2021).

Temuan Bank Dunia ini sejalan dengan hasil penelitian Abrar dan Handoyo (2020) yang menemukan bahwa pengguna internet di perkotaan cenderung lebih banyak di banding di perdesaan. Kesenjangan koneksi internet di Indonesia erat kaitannya dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ketimpangan akses internet. Salah satunya dengan mengimplementasikan proyek infrastruktur Palapa Ring yang tuntas pada 2019. Proyek tersebut berhasil menghubungkan 514 kota/kabupaten pada sambungan tulang punggung nasional. Namun demikian, tugas pemerintah masih belum berakhir karena gap akses internet masih tersisa. Catatan Bank Dunia menunjukkan bahwa hingga kini baru sepertiga masyarakat dewasa Papua yang memiliki sambungan internet, proporsi ini berbeda jauh dengan 55% penduduk dewasa JawaBali yang dapat menikmati jaringan internet (World Bank Group, 2021). Kesenjangan koneksi internet ini merupakan masalah yang mesti segera diselesaikan agar pengembangan kompetensi ASN dengan pola pembelajaran Daring dapat menjawab tuntutan pengembangan kompetensi ASN.

Kementerian Kominfo tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar pada akhir 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia

terjangkau jaringan 4G. Menurut Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, diharapkan pada akhir 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.218, seluruhnya sudah bisa terjangkau sinyal 4G (Waseso, 2021). Upaya untuk menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Indonesia ini akan sangat membantu bagi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN, tidak hanya di masa pandemi, tapi juga di masa pasca pandemi ini.



1. MENGAPA MERDEKA BELAJAR?

Sebelum menjadi menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, Nadiem Anwar Makarim melakukan riset tentang tugas yang akan dijalannya sampai tiga bulan beliau menjalankan tugas resminya. Riset dilakukan untuk menemukan solusi dari persoalan pendidikan yang sudah diupayakan dari masa-masa sebelumnya. Upaya menemukan solusi dilaksanakan melalui diskusi dengan banyak pihak seperti para pakar pendidikan, guru, kepala sekolah dan berbagai kalangan masyarakat.

Dari berbagai diskusi yang dilakukan didapati pemahaman bahwa mengelola pendidikan memiliki keunikan tersendiri. Pendidikan adalah usaha sistematis yang berkenaan dengan pembentukan manusia. Mengupayakan terbentuknya manusia sesuai prinsip yang diamanatkan dalam undang-undang adalah hal yang sangat kompleks. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan manajerial atau administratif.

Pendekatan manajerial menganggap bahwa kualitas pendidikan yang diharapkan bisa dicapai dengan menentukan bagian mana yang bisa diberikan insentif lebih dan mana yang bisa diberikan insentif sedikit, lalu ditetapkan target-target tertentu untuk dicapai. Dengan kata lain dilakukan pendekatan manajerial di dunia pendidikan. Namun setelah ratusan diskusi persepsi ini ternyata tidak bisa diterapkan untuk pendidikan. Selanjutnya pendekatan administratif yang berlangsung selama ini menyebabkan banyak guru dan kepala sekolah teralihkan perhatiannya pada urusan administrasi pendidikan dan tidak maksimal mengurus kepentingan siswanya.

Pemikiran mengenai merdeka belajar diperoleh setelah mempelajari kelebihan dari sekolah-sekolah terbaik. Sekolah-sekolah tersebut memiliki budaya belajar (learning culture) dengan banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Budaya belajar ini tumbuh dan berkembang dalam iklim keamanan dan kenyamanan yang membuat warga sekolah tidak takut gagal ketika mencoba, tidak takut dicemooh atau diragukan ketika mencoba Dan tidak mengalami perundungan ketika berkarya.

Budaya belajar menghasilkan "growth mindset" atau pola pikir yang terus berkembang. Seseorang yang memiliki "growth mindset" akan memiliki kemampuan mengadaptasi perubahan zaman.

Pengembangan budaya belajar dengan semangat “merdeka belajar” di dunia pendidikan Indonesia akan diupayakan dengan memperbaiki semua aspek yang berpengaruh, bagaimana merancang program pendidikan bagi guru yang baru masuk ke dunia sekolah, bagaimana mengupayakan kurikulum fleksibel sesuai perkembangan dunia digital serta adaptasi administrasi dan regulasi untuk melepaskan kendala serta sekat-sekat.

Merdeka belajar dimaksudkan untuk memerdekakan unit pendidikan berinovasi dan bertransformasi kepada budaya belajar (*learning culture*), bukan kepada budaya administratif (*administrative culture*). Budaya belajar akan berkembang jika secara psikologi warga sekolah merasa aman, tidak takut gagal dan memiliki gairah untuk terus mencoba. Kemerdekaan belajar di tingkat satuan secara kolektif berpengaruh pada capaian kualitas pendidikan di tingkat wilayah atau daerah. Oleh karena itu kebijakan merdeka belajar perlu didukung dengan semangat mengubah pola pikir mulai dari satuan pendidikan hingga pemerintah tingkat daerah hingga tingkat nasional.

Pengembangan budaya belajar melalui kebijakan merdeka belajar dilaksanakan dengan melakukan perbaikan pada berbagai sektor. Penataan pendidikan bagi guru yang baru masuk, guru yang sudah berproses dalam kelas fleksibilitas kurikulum, adaptasi administrasi dan regulasi untuk melepaskan kendala serta sekat dan banyak hal lain yang akan dilaksanakan secara bertahap melalui episode kebijakan merdeka belajar. Selanjutnya semua pihak diharapkan bisa memberikan sumbangsih terbaik dalam berbagai episode merdeka belajar sesuai porsinya. Targetnya adalah guru yang senang belajar dan menginspirasi siswanya untuk belajar serta berpartisipasi dalam pendidikan, bukan hanya pasif menerima proses pendidikan yang telah ditentukan secara sepihak. Dengan merdeka belajar semua pihak termasuk pemerintah, guru, kepala sekolah perusahaan dan lain-lain sama-sama menyepakati untuk membentuk budaya belajar yang sesuai untuk mencapai peningkatan kualitas secara terus-menerus. Dengan merdeka belajar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. EPISODE MERDEKA BELAJAR

Ada 4 intervensi umum yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendukung kebijakan merdeka belajar, yaitu:



Intervensi umum tersebut diwujudkan dalam episode-episode yang diluncurkan secara bertahap dan masih terus berkembang. Sampai modul ini dibuat sudah ada 22 episode merdeka belajar yang sudah dipublikasikan secara terbuka.

Merdeka Belajar Episode 1 Asesmen Nasional

Terkait ujian nasional ada empat pokok kebijakan Kemendikbudristek, yaitu:

- Mengganti Ujian Nasional menjadi Asesmen Nasional
- Menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional
- Menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- Menyesuaikan kuota jalur prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis zonasi

Merdeka Belajar Episode 2 Kampus Merdeka

- Memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru
- Penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi
- Kemudahan untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH)
- Hak belajar tiga semester di luar program studi

Merdeka Belajar Episode 3 Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- Transfer dana BOS langsung ke rekening sekolah
- Keleluasaan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS

- c. Peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS
- d. Perbaiki sistem pelaporan dana BOS untuk transparansi dan akuntabilitas

Merdeka Belajar Episode 4 Program Organisasi Penggerak

Memberdayakan organisasi kemasyarakatan untuk bergotong royong meningkatkan kualitas kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan agar tercipta transformasi ekosistem pembelajaran yang berorientasi pada murid.

Merdeka Belajar Episode 5 Program Guru Penggerak

Program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia.

Merdeka Belajar Episode 6 Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi

- a. Insentif berdasarkan capaian IKU (untuk PTN)
- b. Matcing fund untuk kerja sama dengan mitra (untuk PTN dan PTS)
- c. Competitive fund program kompetisi Kampus Merdeka (untuk PTN dan PTS)

Merdeka Belajar Episode 7 Program Sekolah Penggerak

Mengembangkan sekolah-sekolah katalis yang diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistic dalam hal pembelajaran, digitalisasi, sampai pendampingan selama tiga tahun ajaran bagi sekolah negeri maupun swasta.

Merdeka Belajar Episode 8 SMK Pusat Keunggulan

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja dan menjadi rujukan bagi SMK lainnya melalui:

- a. Keterlibatan industri dalam proses pembelajaran
- b. Pelatihan guru-guru kejuruan yang sesuai standar industri
- c. Pelatihan manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah
- d. Fasilitasi pembelajaran berbasis industri
- e. Terlibatnya Perguruan Tinggi sebagai pendamping SMK agar terwujud *link* dan *match* yang semakin optimal.

Merdeka Belajar Episode 9 KIP Kuliah Merdeka

- a. Memberikan kemerdekaan bagi murid dan keluarga miskin dan rentan agar dapat berkuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik
- b. Menaikkan alokasi biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi
- c. Meningkatkan bantuan biaya hidup untuk mendorong mobilitas sosial

Merdeka Belajar Episode 10 Perluasan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan

- a. Beasiswa Kampus Merdeka
- b. Beasiswa bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan
- c. Beasiswa program vokasi dan program prestasi
- d. Beasiswa kebudayaan

Merdeka Belajar Episode 11 Kampus Merdeka Vokasi

- a. Dana kompetitif kampus vokasi (competitive fund vokasi) dengan program SMK D2 jalur cepat dan program peningkatan prodi D3 menjadi sarjana terapan (D4)
- b. Dana padanan kampus vokasi (matching fund vokasi) dengan program penguatan Pusat Unggulan Teknologi (PUT) hilirisasi produk purwarupa/teknologi, dan start up produk inovasi perguruan tinggi

Merdeka Belajar Episode 12 Sekolah Aman Berbelanja Bersama SIPLah

- a. Tata kelola keuangan didokumentasikan secara elektronik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas
- b. Efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyediaan yang lebih banyak atau beragam

Merdeka Belajar Episode 13 Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana

Untuk pertama kalinya di Indonesia, Kemendikbudristek menghadirkan **platform media ekspresi, pustaka, serta promosi budaya** yang terintegrasi dan dapat diakses melalui:

- Laman Indonesiana tv
- Siaran televisi jaringan indihome saluran 200 (SD) dan 916 (HD)
- Media sosial Indonesiana

Merdeka Belajar Episode 14 Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual

- a. Pemenuhan hak pendidikan setiap WNI
- b. Penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan
- c. Peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual
- d. Penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan perguruan tinggi

Merdeka Belajar Episode 15 Kurikulum dan Platform Merdeka Mengajar

- a. Struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan focus pada materi yang esensial sehingga guru lebih leluasa mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik
- b. Memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik

Merdeka Belajar Episode 16 Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

- a. Penyaluran langsung ke rekening satuan pendidikan
- b. Fleksibilitas penggunaan bantuan
- c. Nilai satuan biaya yang disesuaikan dengan kondisi daerah
- d. Digitalisasi perencanaan dan pelaporan dana BOS melalui aplikasi tunggal ARKAS

Merdeka Belajar Episode 17 Revitalisasi Bahasa Daerah

- a. Menjaga kelangsungan hidup bahasa daerah dan sastra daerah
- b. Menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur Bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya
- c. Menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah

Merdeka Belajar Episode 18 Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana

Dana Indonesiana merupakan **dana abadi kebudayaan** yang digunakan untuk mendukung:

- a. Revitalisasi kegiatan ekspresi budaya
- b. Pemajuan kebudayaan secara menyeluruh, stabil dan berkelanjutan

Merdeka Belajar Episode 19 Rapor Pendidikan Indonesia

- a. Platform yang berisi **hasil asesmen nasional** dan **analisis lintas sektor** untuk satuan pendidikan
- b. **Data pendidikan** yang terintegrasi untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan meng**identifikasi capaian** dan **akar masalah**, melakukan **refleksi** serta merancang langkah-langkah pembelajaran yang **efektif** dan **berbasis data**

Merdeka Belajar Episode 20 Praktisi Mengajar

- a. Praktisi mengajar bersama dosen, membantu perenanaan bahan ajar dan melakukan evaluasi di mata kuliah yang sudah ada
- b. Honor praktisi didanai oleh Kemendikbudristek, dana langsung dikirim kepada praktisi
- c. Alokasi anggaran R. 140 miliar untuk lebih dari 2.500 mata kuliah di bawah naungan Kemendikbudristek

Merdeka Belajar Episode 21 Dana Abadi Perguruan Tinggi

- a. Dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp. 7 triliun rupiah yang bunganya akan disalurkan kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang berhasil menggalang dana dari masyarakat
- b. Dana abadi ditargetkan untuk PTNBH sebagai badan hokum yang dapat mengelola asset finansial secara independen
- c. Setiap PTNBH diharapkan memiliki Dana Abadi masing-masing dan menggalang dana tambahan dari tahun ke tahun dan harus memperbesar sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah dan uang kuliah tunggal
- d. Dana Abadi Perguruan Tinggi dapat digunakan secara fleksibel oleh PTNBH

Merdeka Belajar Episode 22 Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri

- a. Seleksi nasional berdasarkan prestasi
- b. Seleksi nasional berdasarkan teks
- c. Seleksi secara mandiri oleh PTN

Merdeka Belajar Episode 23 Buku Bacaan Bermutu Untuk Literasi

Pada tahun 2022, Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksplor buku bacaan bermutu disertai dengan pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia.

3. DIGITALISASI PENDIDIKAN (STATUS PER-10 MARET 2023)

- 71.991 sekolah formal telah menerima bantuan TIK tahun 2020-2022 (Belanja Kemendikbudristek dan DAK Fisik)
- 1.253.074 perangkat TIK telah diberikan untuk mendukung program digitalisasi sekolah
- 4 Platform Digital: Platform Merdeka Mengajar, Platform Kampus Merdeka, Platform Sumber Daya Sekolah, Platform Profil Rapor Pendidikan dan Manajemen Data serta Infrastruktur
- 13.655.723 pengguna Platform Digital pada tahun 2022
- **Platform Merdeka Mengajar (PMM)**
 - ✓ 2.086.622 log in pada Platform Merdeka Mengajar
 - ✓ 150.731 sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka telah mengakses PMM
 - ✓ 1.351.779 PTK yang mengimplementasikan kurikulum merdeka telah mengakses PMM
 - ✓ 607rb+ PTK telah mengunduh perangkat ajar pada PMM
- **Aplikasi RKAS (ARKAS)**
 - ✓ 217.000 atau 99% satuan pendidikan aktif menggunakan ARKAS
 - ✓ 100% dinas aktif menggunakan MARKAS

✓ 54,7 triliun potensi anggaran BOS TA 2022 tercatat pada ARKAS secara transparan

▪ **Aplikasi SIPLah**

✓ 230.515 Satuan Pendidikan telah menggunakan SIPLah

✓ 11,2 triliun telah dibelanjakan melalui SIPLah

✓ 178.105 penyedia barang/jasa telah terhubung dengan 18 mitra e-commerce SIPLah

✓ 11jt Produk tersedia pada SIPLah, baik produk umum maupun UMKM

▪ **Aplikasi TanyaBOS**

✓ 16.456 pengunjung aktif dan berpartisipasi di forum TanyaBOS

✓ 5.315 topik dilayangkan di dalam platform TanyaBOS

PROGRAM INTERNAL KEMENDIKBUDRISTEK BERBASIS DATA PENDIDIKAN

A. INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mempelajari tentang program internal Kemendikbudristek yang berbasis data pendidikan peserta dapat, memahami dan menguraikan program internal Kemendikbudristek berbasis data pendidikan.

B. PROGRAM INTERNAL KEMENDIKBUDRISTEK BERBASIS DATA PENDIDIKAN

Portal Utama dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disajikan sebagai berikut.

1. Layanan Program Prioritas Kemendikbudristeka. Informasi Merdeka Belajar

- a. Akun Belajar
- b. Merdeka Mengajar
- c. Rapor Pendidikan
- d. ARKAS
- e. SIPLah
- f. TanyaBOS
- g. Kampus Merdeka



**MERDEKA
BELAJAR**

Layanan Program Prioritas Kemendikbudristek

2. Layanan Informasi Publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Daftar Informasi Publike-PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)
- b. ePPID (Android)
- c. Maklumat Pelayanan Informasi Publik
- d. Permohonan Informasi Publik
- e. Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik
- f. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
- g. Prosedur Permohonan Informasi Publik
- h. Regulasi Keterbukaan Informasi Publik
- i. Rekap Jumlah Pemohon Informasi Publik

3. Layanan untuk Peserta Didik (Siswa dan Mahasiswa)

- a. Beasiswa Unggulan
- b. Bersama Hadapi Korona
- c. Darmasiswa
- d. Glosarium Bahasa Indonesia
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- f. Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran
- g. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
- h. Pembinaan Kursus dan Pelatihan
- i. Perizinan dan Penyetaraan Ijazah
- j. Perpustakaan
- k. Program Indonesia Pintar
- l. Rumah Belajar
- m. Televisi Edukasi
- n. Ujian Nasional

4. Layanan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Guru dan Dosen)

- a. NUPTK
- b. Bersama Hadapi Korona
- c. Data Pokok Pendidikan Dasar
- d. Guru Berbagi
- e. Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran
- f. Layanan Sumber Daya Dikti
- g. Ruang Guru PAUD
- h. Rumah Belajar
- i. Televisi Edukasi

5. Layanan diperuntukkan untuk Orang Tua

- a. Akreditasi Sekolah/Madrasah
- b. Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran
- c. Perizinan dan Penyetaraan
- d. Sekolah Kita
- e. Standar Nasional Pendidikan

6. Layanan diperuntukkan untuk Satuan Pendidikan

- a. Bantuan Operasional Sekolah
- b. Bursa Kerja Khusus
- c. Helpdesk Dapodik PAUD dan Dikmas
- d. Helpdesk Data Pokok Pendidikan Menengah
- e. Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran
- f. Majalah Jendela
- g. Pembinaan Kursus dan Pelatihan
- h. Penguatan Pendidikan Karakter
- i. Penyaluran Siswa
- j. Program Indonesia Pintar

- k. Program Organisasi Penggerak
- l. Standar Nasional Pendidikan

7. Layanan untuk Kebudayaan dan Bahasa

- a. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
- b. Bantuan Teknis Bahasa
- c. Data Pokok Kebudayaan
- d. Glosarium Bahasa Indonesia
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- f. Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran
- g. Pencatatan dan Penetapan Warisan
- h. Budaya Takbenda
- i. Penyuluhan Bahasa
- j. Registrasi Koleksi Museum
- k. Registrasi Nasional Cagar Budaya
- l. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)

8. Layanan untuk Pemerintah Daerah

- a. Bantuan Teknis Bahasa
- b. Helpdesk Dapodik PAUD dan Dikmas
- c. Jurnal Dikbud
- d. Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran
- e. Majalah Jendela
- f. Neraca Pendidikan Daerah Produk Hukum
- g. Registrasi Koleksi Museum
- h. Registrasi Nasional Cagar Budaya

9. Layanan untuk Masyarakat dan Mitra

- a. Bantuan Operasional Sekolah
- b. Bantuan Teknis Bahasa
- c. Beasiswa Unggulan

- d. Bursa Kerja Khusus
- e. Data Lembaga Masyarakat Bid.Pendidikan& Kebudayaan
- f. Data Referensi Pendidikan dan Kebudayaan
- g. Jendela Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Jurnal Dikbud
- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- j. Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran
- k. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- l. Pembinaan Kursus dan Pelatihan
- m. Penyuluhan BahasaPerizinan Usaha Perfilman
- n. Produk HukumProgram Organisasi Penggerak
- o. Seleksi CPNS Kemendikbud
- p. Statistik Pendidikan

INTEGRASI DATA POKOK PENDIDIKAN DENGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LAIN

A. INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mempelajari integrasi Dapodik dengan Kementerian dan Lembaga yang lain peserta dapat, memahami dan menjelaskan tentang integrasi Dapodik dengan Kementerian dan Lembaga yang lain.

B. PERENCANAAN BERBASIS DATA

Perencanaan berbasis data adalah sebuah proses pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan baik di tingkat satuan pendidikan maupun daerah. Penggunaan rapor pendidikan sebagai acuan data dalam perencanaan diharapkan memberikan perubahan yang bermakna dalam usaha - usaha untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar yaitu pendidikan berkualitas untuk semua. Pemanfaatan platform Rapor Pendidikan dalam perencanaan berbasis data akan mendorong terjadinya perubahan perbaikan dalam hal: (1) peningkatan angka partisipasi, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, (2) peningkatan kualitas layanan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas; serta (3) pendistribusian layanan pendidikan di seluruh Indonesia sehingga tidak ada anak yang tertinggal.

Dalam perencanaan pendidikan terdapat tahap identifikasi data yang merupakan tahapan paling awal dari seluruh rangkaian proses perencanaan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting, namun seringkali kita tidak mampu melakukan tahap identifikasi ini dengan benar dan sesuai dengan yang kita

harapkan. Ketidak sesuaian ini bisa karena informasi yang kita terima tidak sesuai dengan keperluan atau kekurang-mampuan perencana dalam melakukan identifikasi.

Mengidentifikasi data berarti mengenali dan menguji data yang tersedia menjadi suata bahan yang akan dipakai untuk melakukan suatu perencanaan.

Diharapkan dengan adanya Rapor Pendidikan ini, maka data yang akan digunakan oleh satuan pendidikan serta pemerintah daerah merupakan data yang valid dan terup-date langsung dari sumbernya. Sehingga hasil identifikasi dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan yang dapat di pertanggungjawabkan.

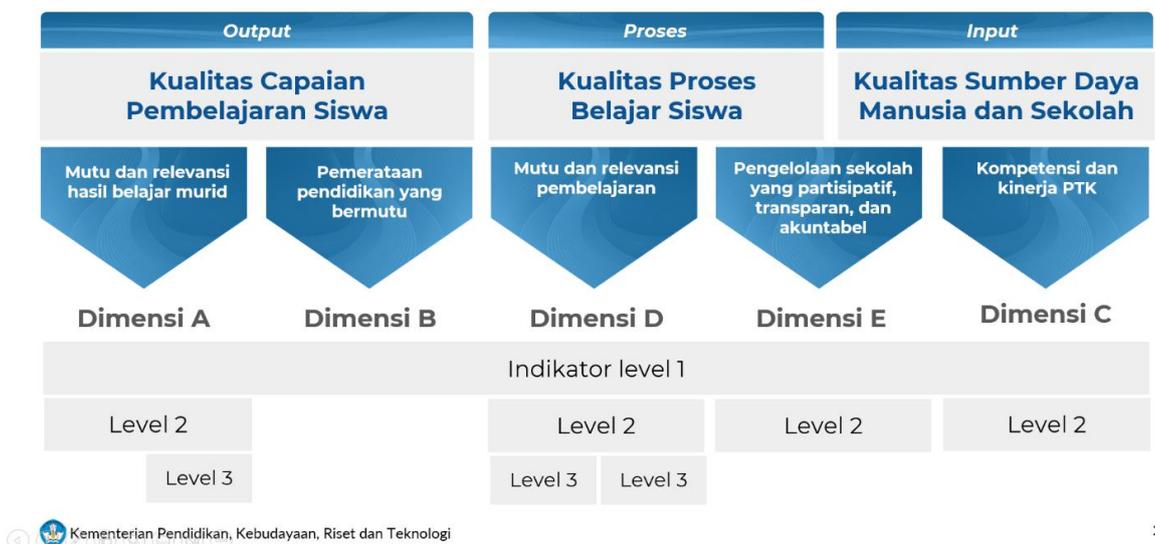
1. Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan menampilkan data kualitas satuan pendidikan atau daerah yang didapat dari berbagai asesmen atau survei nasional.

a. Rapor Pendidikan Dasmen

Struktur Profil Pendidikan Dasar Menengah

Struktur Profil Pendidikan Dasar Menengah (Dasmen) mempunyai kerangka penilaian yang diharapkan dapat memandu upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Peningkatan kualitas layanan pendidikan merupakan perwujudan dari terlaksananya visi dan target kerja pusat, daerah, satuan dan masyarakat. Dalam mencapai peningkatan kualitas layanan pendidikan dibentuklah struktur profil pendidikan dasmen yang tergambar pada gambar.



Gambar Struktur Profil Pendidikan Dasmen

Struktur profil pendidikan Dasmen terdiri dari tiga level yang terbentuk dari lima dimensi sesuai peruntukannya:

1. Level output ini merupakan gabungan 2 dimensi yang berkaitan dengan kualitas capaian pembelajaran siswa. Level output ini terbentuk dari 2 dimensi yaitu dimensi A dan dimensi B. Dimensi A berkaitan dengan mutu dan relevansi hasil belajar murid. Sementara dimensi B berkaitan dengan pemerataan pendidikan yang bermutu.
2. Level proses mengkaji kualitas proses pembelajaran siswa. Kajian dari level ini dilihat oleh dimensi D. Dimensi D mengkaji mutu dan relevansi pembelajaran.
3. Level input merupakan level yang mengkaji kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Untuk mendalami level tersebut dibuat dua dimensi yang berkaitan yaitu dimensi C dan E. Dimensi C berkaitan dengan kompetensi dan kinerja PTK. Sementara dimensi E merupakan dimensi yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pada setiap level dijelaskan oleh berbagai dimensi yang terkait dengan level. Dimensi-dimensi tersebut dapat membantu dalam penggalian informasi terkait level yang hendak diukur. Berkaitan dengan ini ada beberapa informasi terkait dimensi-dimensi yang berada dalam level.

1. Dimensi A merupakan dimensi yang mengkaji mutu dan relevansi hasil belajar siswa. Dimensi ini lebih spesifik membahas terkait kualitas dari hasil pembelajaran. Adapun dalam melihat kualitas dari hasil pembelajaran terdapat beberapa indikator diantaranya indikator kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan indeks karakter. Adapun beberapa indikator lain yaitu penyerapan lulusan SMK, pendapatan lulusan SMK dan kompetensi lulusan SMK. Namun, indikator ini hanya ada pada level daerah bukan satuan pendidikan.
2. Dimensi B lebih berfokus pada pemerataan pendidikan yang bermutu. Dimensi pemerataan pendidikan yang bermutu berada pada level daerah. Pada laporan pendidikan di satuan pendidikan tidak ada dimensi ini.
3. Dimensi D yaitu berkaitan dengan mutu dan relevansi pembelajaran. Pada dimensi ini ada beberapa indikator yang berkaitan dengan satuan pendidikan dan daerah. Indikator yang berada pada laporan pendidikan di satuan pendidikan yaitu kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional, iklim keamanan sekolah, iklim kesetaraan

gender, iklim kebhinekaan, iklim inklusivitas, dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran.

4. Dimensi lainnya yaitu dimensi C, dimensi ini berfokus dalam mengkaji kompetensi dan kinerja GTK. adapun beberapa indikator terkait dimensi ini yaitu proporsi GTK bersertifikat, proporsi GTK penggerak, Pengalaman pelatihan guru, kualitas GTK penggerak, Nilai UKG, kehadiran guru di kelas, dan pemenuhan kebutuhan guru. Namun untuk indikator kehadiran guru di kelas sampai saat ini belum tersedia.
5. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi E. Dimensi E berkaitan dengan pengelolaan sekolah yang partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Dimensi E memiliki beberapa indikator diantaranya Partisipasi warga sekolah, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah, dan pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran.

b. Rapor Pendidikan PAUD

Struktur Profil Pendidikan untuk PAUD

Struktur Profil Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi sebagai kerangka penilaian yang digunakan untuk memandu upaya peningkatan kualitas layanan untuk pendidikan anak usia dini sebagai perwujudan kesamaan visi dan target kinerja pusat, daerah, satuan dan masyarakat.

Struktur profil pendidikan untuk PAUD terdiri atas lima dimensi yang berfungsi sebagai pengelompokan indikator sesuai dengan peruntukannya:

1. Pada level outcome, ada dimensi capaian perkembangan anak, yang berisikan indikator perkembangan anak usia dini. Sesuai dengan Perpres 60 tahun 2013 mengenai PAUDHI, tumbuh kembang anak usia dini merupakan upaya lintas sektor (tidak hanya sektor pendidikan saja), maka pengukuran capaian perkembangan anak akan menggunakan mekanisme pengukuran yang disepakati lintas sektor dalam upaya pemenuhan SDG.
2. Pada level output, ada dimensi pemerataan akses ke layanan berkualitas. Indikator yang ada di dalam dimensi ini mengukur target kinerja terkait pemerataan akses, serta pemerataan terhadap layanan yang berkualitas. Proksi yang digunakan untuk layanan berkualitas adalah akreditasi.
3. Pada level proses, ada dua dimensi yang digunakan untuk memandu peningkatan kualitas layanan di PAUD: a. dimensi D. Kualitas Proses Pembelajaran, yang

memandu upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran yang terjadi di PAUD; dan b. dimensi E. Kualitas Pengelolaan Satuan, yang memandu upaya peningkatan kualitas pengelolaan di satuan PAUD.

4. Pada level input, ada dimensi C yang digunakan untuk memantau ketersediaan, kompetensi, serta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; serta pemerataan kepemilikan kompetensi dan kinerja dari pendidik dan tenaga kependidikan. Tanpa adanya input sumber daya yang memadai, maka kualitas layanan pada level proses tidak akan dapat terwujud.

Karena konteks PAUD dengan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki perbedaan, maka terdapat perbedaan struktur profil pendidikan di PAUD dengan Dasar Menengah di dalam Evaluasi Sistem Pendidikan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Indikator dalam dimensi A (Capaian Perkembangan Anak) belum akan ada di tahun 2022. Kemendikbudristek mengikuti mekanisme pengukuran yang disepakati lintas sektor.
2. Pemerintah daerah menggunakan indikator dalam dimensi B dan C untuk proses perencanaannya. Indikator D dan E belum tersedia untuk pemerintah daerah.
3. Satuan PAUD menggunakan indikator dalam dimensi D dan E untuk proses perencanaan melalui proses evaluasi diri (cara melakukan evaluasi diri akan dijelaskan lebih lanjut di bagian Perencanaan Berbasis Data untuk PAUD).

Dimensi D dan E Sebagai Rujukan Transformasi Sekolah menuju PAUD Berkualitas.

Transformasi sekolah menuju PAUD berkualitas diukur menggunakan indikator dalam dimensi D dan E

Daerah dan satuan dapat menggunakan indikator di dalam profil pendidikan agar dapat memahami kegiatan dan layanan apa saja yang perlu ada di satuan PAUD, serta merancang pendampingan yang diperlukan bagi **pendidik dan tenaga kependidikan**.

INPUT	PROSES			
Dimensi C	Dimensi D	Dimensi E		
Pendidik dan tenaga kependidikan adalah fondasi dari PAUD Berkualitas. Kapasitas dan kesejahteraan PTK perlu menjadi perhatian agar keempat elemen ini terwujud	KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pembelajaran yang efektif. Pendekatan pembelajaran memberikan pengalaman menyenangkan, dan berpusat pada anak, sesuai untuk anak usia dini. Muatan pengembangan yang selaras dengan kurikulum, menguatkan aspek perkembangan, kontekstual dan bermakna. Asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. 	KEMITRAAN DENGAN ORANG TUA <ul style="list-style-type: none"> Adanya interaksi terencana dengan orang tua/wali untuk membangun kesinambungan stimulasi dari PAUD dan di rumah (wadah komunikasi, kelas orang tua, komite, kegiatan yang melibatkan orang tua, dst). Penguatan peran dan kapasitas orang tua/wali sebagai mitra pengajar dan sumber belajar. 	DUKUNGAN PEMENUHAN LAYANAN ESENSIAL AUD DI LUAR PENDIDIKAN <ul style="list-style-type: none"> Kelas orang tua, wahana untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan esensial anak (intervensi gizi-sensitif). Pemantauan pertumbuhan anak (tinggi badan, lingkar kepala, berat badan). Pemantauan perkembangan anak, termasuk imunisasi dasar lengkap. Berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan. Menerapkan PHBS melalui pembiasaan. Kepemilikan fasilitas sanitasi dan air bersih (minimal, menggunakan material sederhana dan ada air mengalir). Memberikan PMT dan/atau makanan bergizi secara berkala (minimal 3 bulan sekali). Memantau kepemilikan identitas (NIK) peserta didik. 	KEPEMIMPINAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA <p>Mampu menghadirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarpras Esensial yang berfokus pada keamanan peserta didik dan esensial untuk mendukung kualitas layanan. Iklim aman (fisik-psikis) Iklim inklusif Iklim Partisipatif (trisentra) Pengelolaan sumber daya melalui perencanaan berbasis data Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru
	 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi			

Gambar Indikator dimensi D dan E pada Laporan Pendidikan PAUD

Berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah, fokus di PAUD bukan pada hasil belajar, namun pada peningkatan kualitas layanan PAUD. Prinsip ini selaras dengan filosofi bahwa tanggung jawab untuk perkembangan anak yang baik bukan terletak pada anak, namun pada kemitraan antara satuan PAUD, keluarga dan masyarakat; serta dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang diperlukan anak usia dini.

Seluruh pihak, utamanya satuan PAUD, dalam menggunakan indikator dalam Dimensi D dan E sebagai rujukan dalam proses transformasinya menjadi PAUD Berkualitas. Indikator layanan di dalam dimensi D dan E tidak terpaku pada persyaratan administratif yang tidak langsung berkorelasi pada kualitas layanan, namun utamanya pada kualitas pembelajaran dan pengelolaannya. Dalam konteks ini, ketersediaan sarana prasarana merupakan pendukung dalam memastikan lingkungan belajar di satuan PAUD aman dan mendukung terjadinya proses pembelajaran yang nyaman bagi setiap peserta didik.

Sebagai catatan bagi satuan PAUD dalam memahami indikator dimensi D dan E: Pemenuhan indikator kinerja perlu dimaknai sebagai proses perjalanan satuan PAUD dalam upayanya menyediakan layanan berkualitas. Indikator digunakan untuk memantau kemajuan, serta perlu dimaknai sebagai titik berangkat, bukan sebagai model preskriptif. Satuan PAUD dapat menerapkan laju yang berbeda dalam memenuhi indikator layanan PAUD berkualitas, serta fokus pemenuhan

indikator kinerja dapat berbeda antar satuan. Artinya, satuan PAUD dapat mengembangkan alur pembelajaran (learning journey) sendiri yang selaras dengan visi misi, kapasitas dan karakteristik satuan pendidikannya.

Lingkungan belajar berkualitas di PAUD

Pengertian dari satuan PAUD dengan lingkungan belajar berkualitas adalah satuan PAUD yang memfokuskan layanannya kepada empat elemen: kualitas proses pembelajaran; kemitraan dengan orang tua; mendukung pemenuhan layanan esensial untuk anak usia dini; dan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya.

Kualitas Proses Pembelajaran

- Indikator di dalam dimensi D adalah indikator yang memandu upaya menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas. Kualitas proses pembelajaran umumnya merujuk pada i) kemampuan satuan merencanakan pembelajaran; ii) kualitas interaksi guru dengan anak, pendekatan pembelajaran yang digunakan, iii) kemampuan pedagogik pendidik untuk dapat merancang rencana pembelajaran yang berisikan muatan sesuai arahan kurikulum yang digunakan, serta iv) menerapkan asesmen yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya.
- Indikator dimensi E adalah indikator yang memandu upaya satuan PAUD agar dapat mengelola sumber dayanya dengan baik, sehingga mampu: i) bermitra dengan orang tua; ii) mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini, dan iv) memiliki kepemimpinan dan kemampuan mengelola sumber dayanya sehingga menghadirkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, partisipatif dan meningkatkan kualitas layanannya secara berkelanjutan melalui perencanaan yang akuntabel.

Kemitraan dengan Orang Tua

- Kemitraan PAUD dengan orang tua sangatlah penting mengingat kegiatan di satuan PAUD umumnya cukup singkat, jika dibandingkan dengan durasi kebersamaan anak dengan orang tua/wali di rumah. Agar dapat berkembang dengan optimal, anak perlu mendapat stimulasi setiap saat. Tidak hanya saat ia berada di satuan PAUD. Karenanya kemitraan satuan PAUD dengan orangtua/wali adalah kunci terjadinya kesinambungan dalam berkegiatan main dan nilai pendidikan yang dikenalkan di satuan PAUD dan di rumah.

Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini

- Peran PAUD dalam mendukung kebutuhan esensial anak usia dini selaras dengan peran Kemendikbudristek dalam mendukung terwujudnya PAUDHI (Peraturan Presiden no 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif), yaitu suatu kondisi di mana layanan untuk anak usia dini tersedia secara holistik dan diselenggarakan secara integratif melalui kemitraan berbagai unit di suatu komunitas. Satuan PAUD yang berkualitas adalah satuan yang tidak hanya menyediakan aspek pendidikan saja. Agar anak berkembang dengan utuh, maka satuan PAUD perlu juga memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak di luar pendidikan, yaitu kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan melalui 8 indikator kinerja yang digunakan. Penyediaan layanan ini tidak harus dipenuhi oleh satuan PAUD secara mandiri, namun dapat bermitra dengan unit layanan di sekitarnya.

Kepemimpinan dan Pengelolaan Sumber Daya

- Agar tersedia layanan yang berkualitas, maka diperlukan elemen kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang kuat. Adanya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya memastikan adanya kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya agar dapat memenuhi janji layanan; serta tersedianya sarana prasarana yang menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Aspek ini mencakup tidak hanya keamanan dan keselamatan fisik anak, namun juga keamanan sosial emosional anak saat berada di lembaga PAUD sebagai bentuk dukungan pengembangan kesejahteraan (well-being) anak.

Sumber daya manusia yang berkualitas

- Fondasi dari layanan PAUD adalah sumber daya yang berkualitas. Tanpa adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten, bagaimana peserta didik akan mendapatkan layanan yang baik? Karenanya, setiap penyelenggara layanan harus memastikan sudah memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi untuk menjalankan kegiatan serta visi misi satuan sehingga setiap peserta didik dapat mencapai profil yang diharapkan di akhir partisipasinya.

Platform Rapor Pendidikan

Platform Rapor Pendidikan merupakan platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan dari Rapor Mutu yang sudah ada sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru ini menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi.

Sehingga diharapkan Rapor Pendidikan dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh, karena disebut sebagai penyempurnaan dari Rapor Mutu yang sudah ada sebelumnya.

a. Manfaat Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan dapat dijadikan sebagai:

1. Referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan;
2. Satu-satunya platform untuk melihat hasil Asesmen Nasional;
3. Sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi;
4. Instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik untuk evaluasi internal maupun eksternal;
5. Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output);
6. Platform penyajian data yang terpusat. Satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi.

Dengan melihat manfaat Rapor Pendidikan di atas, penggunaan Rapor Pendidikan sangat disarankan bagi satuan pendidikan atau dinas karena dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar untuk melaksanakan Perencanaan Berbasis Data.

Data yang ada dalam Rapor Pendidikan sudah sangat lengkap dan dapat merepresentasikan kondisi satuan pendidikan atau daerah pada saat ini sehingga pada dasarnya pengguna tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data atau menggunakan platform selain Rapor Pendidikan.

b. Akses Rapor Pendidikan

Sebelum menggunakan platform Rapor Pendidikan, perlu diketahui yang dapat mengakses Rapor Pendidikan untuk satuan pendidikan adalah kepala satuan pendidikan, tenaga pendidik yang ditunjuk dan operator sekolah yang memiliki akun belajar.id dengan domain @admin. Perluasan akses akan dilakukan secara bertahap

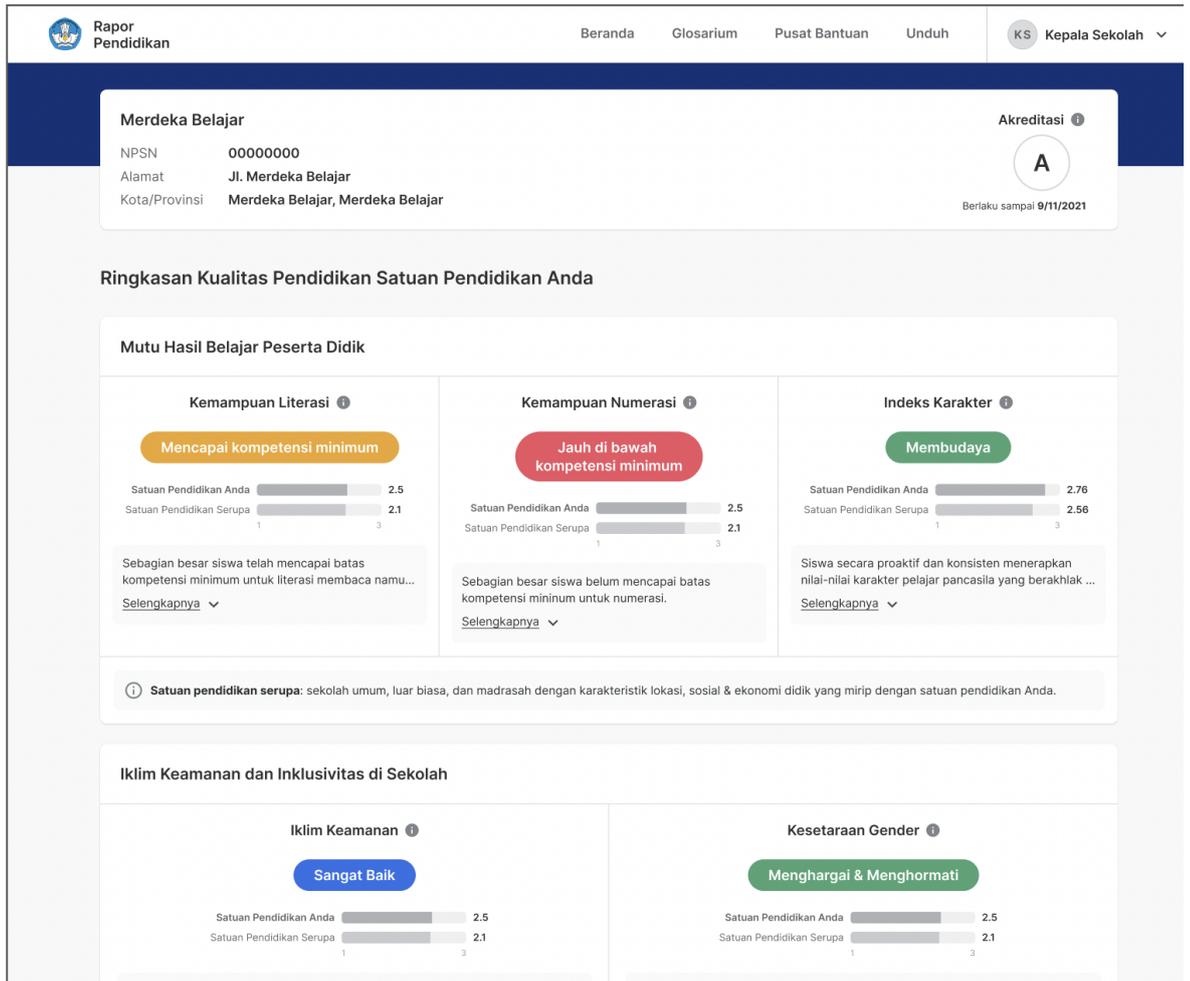
dimulai Juli 2022, yaitu untuk guru program Guru Penggerak angkatan 1, 2, 3; guru program Sekolah Penggerak angkatan 1, 2; dan guru program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan angkatan 1, 2.

Sedangkan yang dapat mengakses Rapor Pendidikan untuk dinas daerah adalah pejabat dinas yang ditunjuk untuk memiliki wewenang untuk mengakses platform Rapor Pendidikan, yaitu yang memiliki akun belajar.id dengan domain @dinas. Namun pada praktiknya, kepala satuan pendidikan atau dinas memiliki hak dan wewenang untuk memperbolehkan tenaga kependidikan atau jajarannya untuk melihat hasil Rapor Pendidikan.

Untuk masuk ke platform Rapor Pendidikan, Anda perlu terhubung dengan koneksi internet, tetapi tidak perlu khawatir karena Anda dapat mengunduh data hasil Rapor Pendidikan dalam format Microsoft Excel yang dapat dipergunakan secara luring.

Tampilan Rapor Pendidikan

Berikut adalah tampilan beranda Rapor Pendidikan untuk Satuan Pendidikan:



Gambar Tampilan beranda Rapor Rapor Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan dapat melihat secara lebih detail elemen-elemen per dimensi, sehingga dapat menggali kondisi capaian dan proses pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan.

Terdapat perbandingan capaian antar Kab/Kota, Provinsi dan Nasional. Dan juga terdapat data distribusi kemampuan pada indikator tertentu.

Rapor Pendidikan

Beranda Glosarium Pusat Bantuan Unduh KS Kepala Sekolah

Beranda > Kualitas Pendidikan Sekolah > Mutu Hasil Belajar

Hasil Belajar Peserta Didik

Hasil belajar peserta didik bisa dilihat dari aspek kognitif dan nonkognitif. Aspek kognitif diukur dari kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, sementara aspek nonkognitif diukur dari karakter dan perilaku yang sejalan dengan nilai Pancasila.

Kemampuan Literasi

Jauh di bawah kompetensi minimum

Kemampuan literasi terdiri dari:

- Kompetensi membaca teks informasi
- Kompetensi membaca teks sastra

Selengkapnya

Distribusi kemampuan peserta didik

- 70% mahir
- 15% cakap
- 5% mendasar

Kemampuan Numerasi

Jauh di bawah kompetensi minimum

Kemampuan numerasi terdiri dari:

- Domain bilangan
- Aljabar

Selengkapnya

Distribusi kemampuan peserta didik

- 70% mahir
- 15% cakap
- 5% mendasar

Indeks Karakter

Membudaya

Indeks karakter terdiri dari:

- Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlaq Mulia
- Gotong Royong

Selengkapnya

Kemampuan Numerasi

Jauh di bawah kompetensi minimum

Kemampuan numerasi terdiri dari:

- Domain bilangan
- Aljabar

Selengkapnya

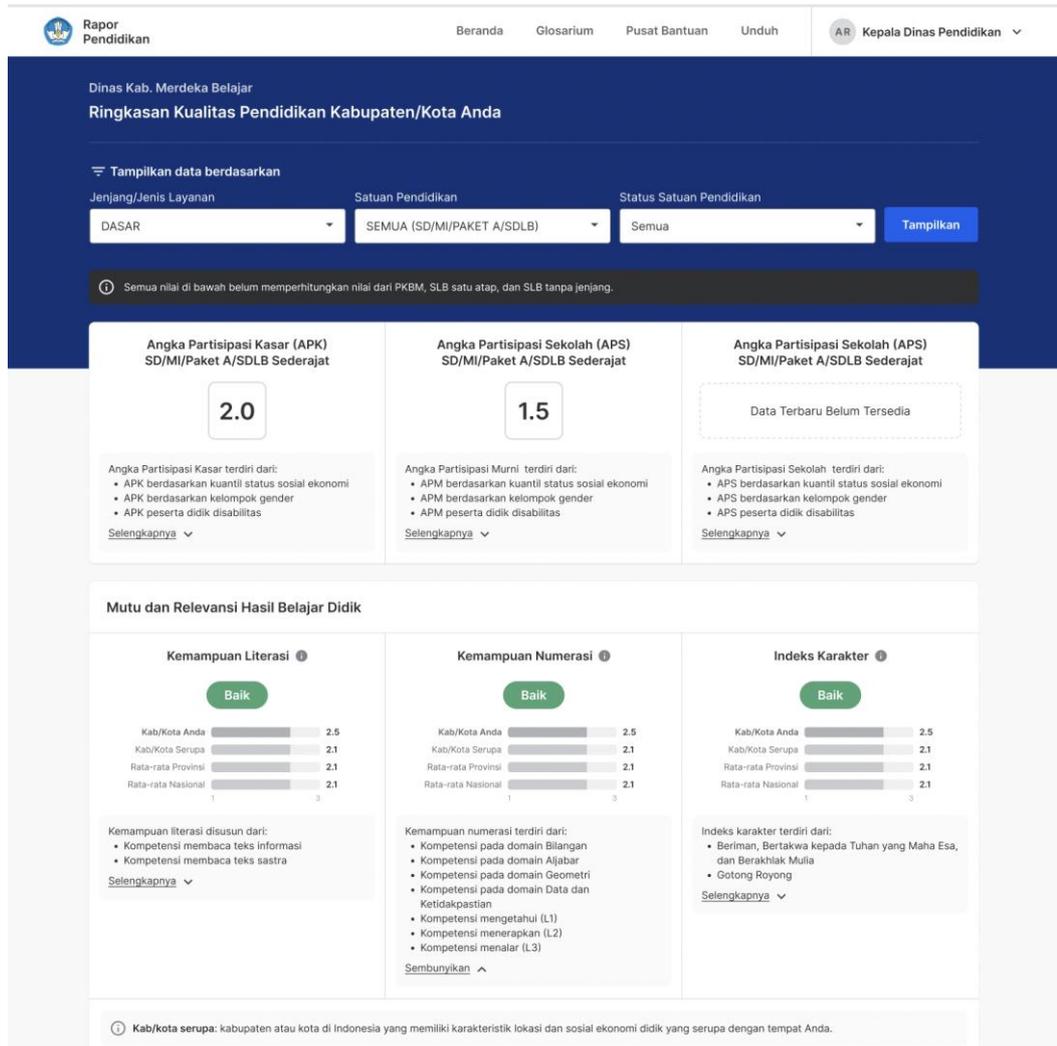
Distribusi kemampuan peserta didik

- 70% mahir
- 15% cakap
- 5% mendasar
- 10% perlu intervensi



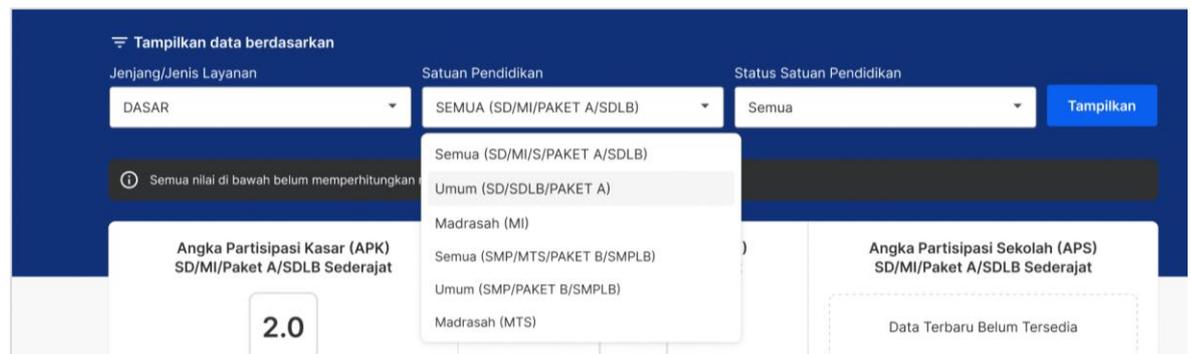
Gambar Tampilan Hasil Rapor Satuan Pendidikan

Berikut adalah tampilan beranda Rapor Pendidikan untuk Dinas:



Gambar Tampilan Beranda Rapor Pendidikan Daerah

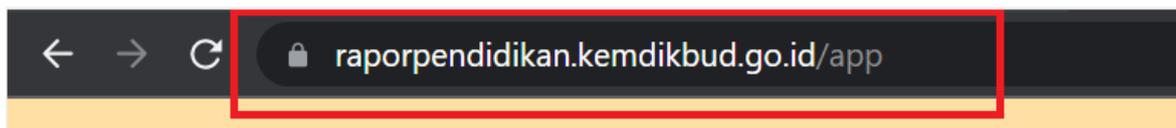
Dinas dapat melihat secara makro, apa saja isu yang terjadi di dalam daerah masing-masing dan juga dapat melihat berdasarkan jenjang yang menjadi fokus. Terdapat fitur “filter” untuk jenjang dan satuan pendidikan.



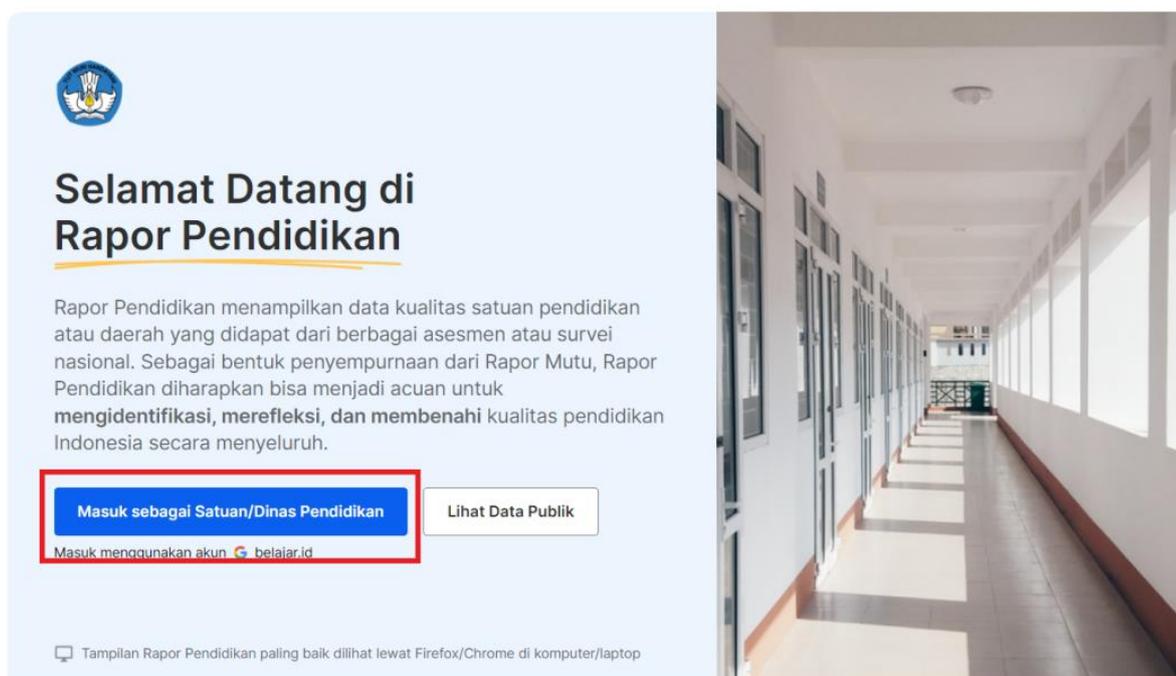
Gambar 10: Tampilan Fitur “filter” pada Rapor Pendidikan Daerah

Cara Masuk ke Platform Rapor Pendidikan

Ketik laman situs raporpendidikan.kemdikbud.go.id pada peramban desktop maupun gawai Anda. Namun, sebaiknya Anda mengakses melalui desktop untuk mendapatkan pengalaman lebih optimal.



Klik tombol “Masuk sebagai Satuan/Dinas Pendidikan” di laman ini



Kemudian, pilih akun Google Anda dengan alamat email berakhiran @dinas.belajar.id atau @admin.jenjang.belajar.id

c. Unduh Laporan Data Rapor Pendidikan

Salah satu fungsi yang ada pada Rapor Pendidikan adalah Anda dapat mengunduh hasil laporan data yang lebih detail dan lengkap dalam format excel. Saat ini, laporan ini dapat melihat hasil capaian hingga level 2 (dua).

Untuk dapat mengakses Rapor Pendidikan secara daring, Anda harus terkoneksi dengan internet. Namun, Anda tetap bisa mengunduh data hasil Rapor pendidikan dalam berkas excel agar dapat digunakan secara luring.

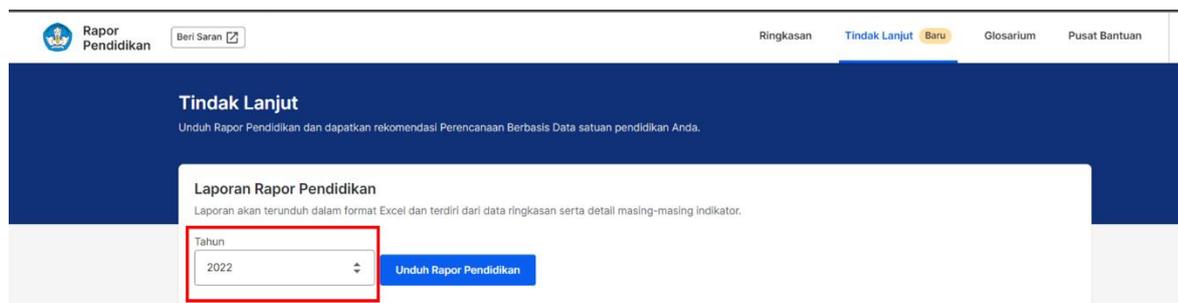
Cara Unduh Laporan Data Rapor Pendidikan

Berikut adalah tahapan untuk mengunduh data hasil dari Rapor Pendidikan:

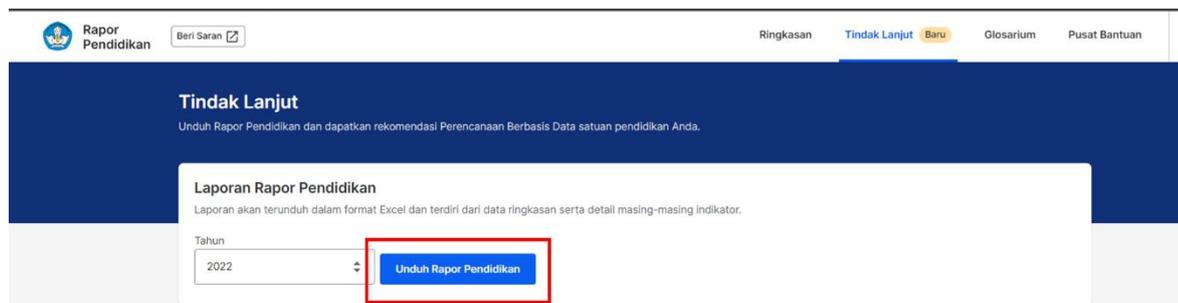
1. Klik menu "Tindak Lanjut" pada bagian atas laman,



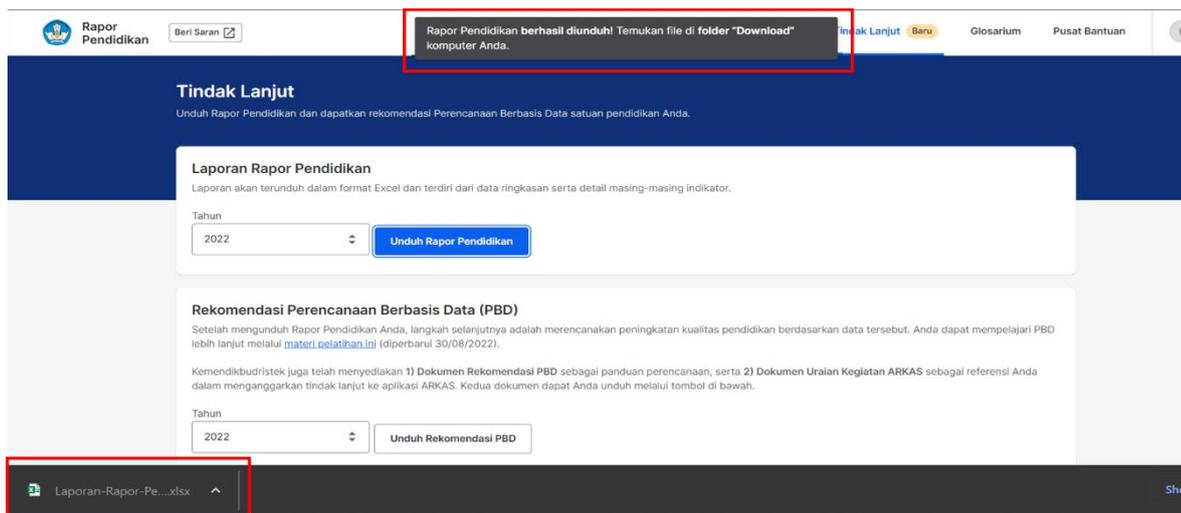
2. Pilih tahun di mana data disajikan,



3. Pilih Unduh, lalu pilih pada folder unduhan di perangkat Anda,



4. Jika data sudah berhasil di unduh, Anda akan mendapatkan pemberitahuan seperti di bawah ini, kemudian Anda dapat memilih berkas excel yang berhasil diunduh.



Jika Anda sudah berhasil mengunduh data hasil Rapor Pendidikan, rincian data yang akan didapatkan adalah sebagai berikut:

- Nomor dan Nama Indikator
- Nilai Sekolah Anda
- Capaian
- Detail Perbandingan
- Rentang nilai
- Definisi Indikator
- Definisi Capaian
- Waktu Pengkinian data
- Level

2. Dapodik

Dapodik (Data Pokok Pendidikan) adalah sistem informasi pendataan pendidikan di Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Dapodik terdapat berbagai unsur yang terkait dengan data pendidikan di Indonesia, di antaranya:

1. Data sekolah: informasi mengenai sekolah, seperti nama sekolah, jenis sekolah, alamat, nomor telepon, dan sebagainya.
2. Data peserta didik: informasi mengenai siswa atau murid, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk siswa, dan sebagainya.
3. Data pendidik dan tenaga kependidikan (PTK): informasi mengenai guru dan karyawan di sekolah, seperti nama, jenis kelamin, nomor induk pegawai, dan sebagainya.

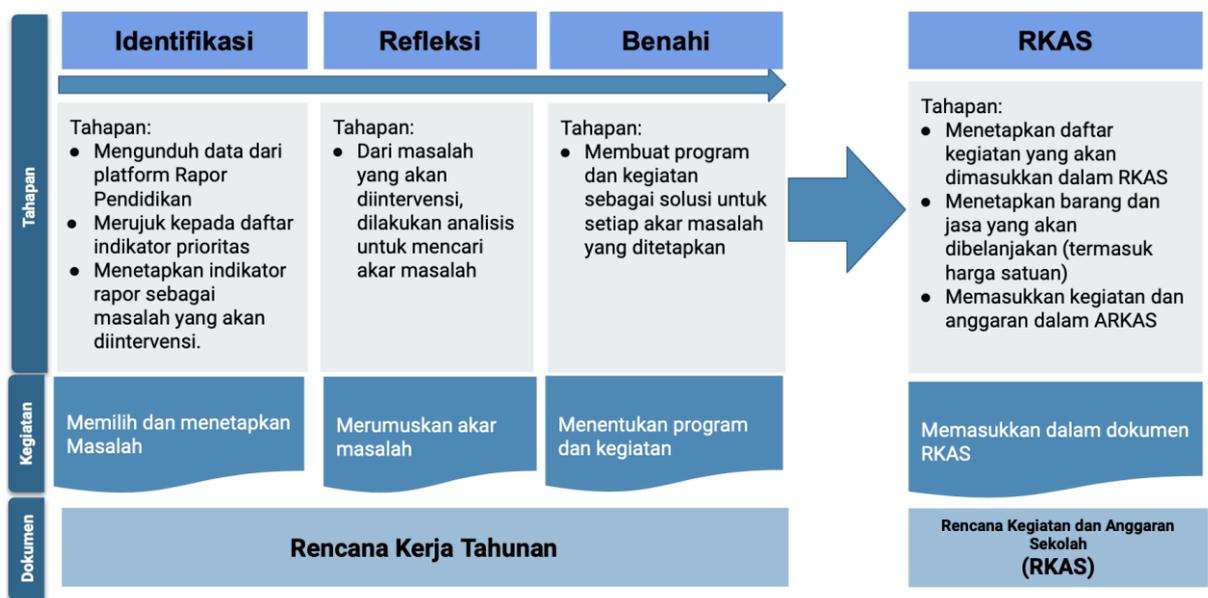
4. Data rombongan belajar: informasi mengenai kelas atau rombongan belajar, seperti nama kelas, jumlah siswa, nama wali kelas, dan sebagainya.
5. Data mata pelajaran: informasi mengenai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, seperti nama mata pelajaran, kode mata pelajaran, dan sebagainya.
6. Data jenjang pendidikan: informasi mengenai jenjang pendidikan, seperti jenjang pendidikan dasar (SD, MI, SMP, MTs) dan jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA).
7. Data nilai: informasi mengenai nilai yang diperoleh siswa pada setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
8. Data absensi: informasi mengenai kehadiran siswa dan guru di sekolah.
9. Data sarana dan prasarana: informasi mengenai fasilitas dan peralatan yang ada di sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya.
10. Data anggaran: informasi mengenai dana yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan di sekolah.

C. IDENTIFIKASI, REFLEKSI DAN BENAHİ PADA SATUAN PENDIDIKAN

Perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan dipilah menjadi perencanaan untuk pendidikan PAUD dan untuk pendidikan dasar dan menengah. Hal ini ini karena selain keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda, juga karena saat ini belum ada rapor pendidikan untuk PAUD sehingga terdapat langkah-langkah perencanaan yang berbeda.

1. Identifikasi, Refleksi dan Benahi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 Satuan pendidikan melakukan proses perencanaan dengan cara yang beragam, dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Dari yang hanya melakukan duplikasi dari tahun sebelumnya atau dari sekolah lain, sampai dengan yang melakukan dengan sangat serius berdasarkan analisis atas rapor mutu dan diskusi dengan para pemangku kepentingan satuan pendidikan. Dari keragaman proses perencanaan yang sudah dilakukan satuan pendidikan, serta untuk memudahkan dalam proses perencanaan satuan pendidikan yang menggunakan rapor pendidikan sebagai acuan data, maka dibuat tahapan sederhana proses perencanaan berbasis data. Tahapan ini dapat menjadi acuan umum, namun satuan pendidikan dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan sumberdaya, kapasitas, dan kondisi yang dihadapi.

Tahapan dalam perencanaan berbasis data di pendidikan dasar menengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Alur Perencanaan Berbasis Data di Pendidikan Dasar dan Menengah

Identifikasi

Tahapan identifikasi dilakukan untuk memilih dan menentukan masalah yang akan diselesaikan dalam satu periode perencanaan. Tahapan identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Unduh Profil Pendidikan dari Platform Rapor Pendidikan. Di dalam platform rapor pendidikan terdapat menu unduhan rapor pendidikan. Satuan pendidikan tinggal mengunduh dalam bentuk excel atau dapat juga di cetak.
2. Pelajari indikator-indikator yang ada dan petakan indikator yang masih bermasalah. Dalam dokumen excel hasil unduhan rapor, terdapat daftar nama indikator, skor, label, dan warna. Dengan melihat skor dan warna masing masing indikator baik indikator level 1 atau level 2, maka satuan pendidikan dapat membuat daftar indikator yang dianggap bermasalah. Indikator bermasalah, misalnya, dapat diidentifikasi dari indikator yang berwarna merah atau kuning. Jika sebagian besar indikator sudah berwarna hijau atau biru, dapat juga dilihat perbandingannya dengan sekolah setara. Hasil dari identifikasi masalah pada tahapan ini dapat dimasukkan ke kolom “indikator rapor yang bermasalah” pada Form Identifikasi.
3. Kemdikbudristek telah menetapkan indikator prioritas bagi satuan pendidikan sebagai fokus untuk meningkatkan kualitas layanan sebagai indikator yang perlu diprioritaskan.

Indikator prioritas Satuan Pendidikan Dasar Menengah (SD, SMP, SMA, SMK) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Menu Prioritas Dasmen	Rasionalisasi
----	-----------------------	---------------

1	A.1 Kemampuan Literasi	Literasi dan numerasi adalah fondasi kemampuan belajar. Kemampuan literasi dan numerasi meningkatkan daya saing di era berbasis teknologi dan digital terutama di kancah internasional. Mampu menyaring informasi yang valid dengan hoax yang beredar.
2	A.2 Kemampuan Numerasi	
3	A.3 Indeks Karakter	Basis untuk tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Terdapat korelasi antara kemampuan literasi-numerasi dan karakter peserta didik.
4	D.4 Iklim Keamanan Sekolah	Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik di satuan pendidikan dalam hal perasaan aman, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Iklim keamanan berdampak pada kualitas pembelajaran.
5	D.5 Iklim Kebhinekaan	Toleransi, perasaan diterima atas perbedaan yang ada merupakan salah satu faktor pendukung iklim pembelajaran.

Indikator prioritas Satuan Pendidikan SLB dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Menu Prioritas Dasmen	Rasionalisasi
1	D.1 Kualitas Pembelajaran	Suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif menjadi keniscayaan agar ABK percaya diri terhadap potensi dan kompetensinya , merasa dihargai, dan tidak dibedakan.
2	D.2 Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru	Dengan beragamnya jenis ketunaan dan kebutuhan murid, guru harus lebih aktif meningkatkan kualitas pembelajaran , mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan berinovasi.
3	D.3 Kepemimpinan Instruksional	Peranan kepala sekolah yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran, mengelola kurikulum sekolah yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid
4	D.4 Iklim Keamanan Sekolah	Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik di satuan pendidikan dalam hal perasaan aman, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Iklim keamanan berdampak pada kualitas pembelajaran.

5	D.5 Partisipasi Warga Sekolah	SLB perlu menjalin kemitraan dengan orang tua agar terjadi kesinambungan antara yang dipelajari anak di satuan dan di rumah.
---	-------------------------------	---

3. Pilih indikator yang ingin diintervensi dengan mempertimbangkan indikator prioritas dan indikator yang bermasalah

Form yang dapat digunakan dalam tahapan identifikasi adalah sebagai berikut:

Form 1: Identifikasi

No	Indikator Rapor yang bermasalah	Menu Prioritas	Indikator yang akan diintervensi
1	Tuliskan hasil pemetaan indikator yang dianggap masih perlu ditingkatkan dari capaian rapor pendidikan	Tuliskan seluruh daftar indikator prioritas yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek	Pilih dan tetapkan indikator yang akan diintervensi dari daftar indikator yang perlu ditingkatkan dan dengan mempertimbangkan indikator prioritas

Refleksi

Tahapan Refleksi dilakukan untuk menemukan perumusan perbaikan dari permasalahan yang muncul. Tahapan Refleksi adalah sebagai berikut:

1. Dari masalah yang akan diintervensi, cari akar masalah dari setiap masalah yang dipilih. Metode perumusan akar masalah dapat dilakukan dengan cara yang beragam dari yang paling sederhana sampai penggunaan analisis data yang kompleks.
2. Jika identifikasi masalah adalah 5 menu prioritas, maka akar masalah dapat merujuk dengan contoh sebagai berikut:
 - a. Perumusan identifikasi, refleksi, benahi berikut dapat digunakan oleh satuan pendidikan sebagai referensi dalam dalam menyusun perencanaan berbasis

- data.
- b. Langkah yang bisa dilakukan:
 - 1) Pilihlah salah satu masalah dari daftar identifikasi. Kemudian, pilih satu akar masalah yang menyebabkan masalah itu terjadi dari daftar refleksi. Dari akar masalah tersebut, pilih satu atau lebih kegiatan dari daftar benahi.
 - 2) Jika satuan pendidikan ingin menambah akar masalah lain, pilih satu lagi akar masalah dari daftar refleksi dan selanjutnya pilih kegiatan dari daftar benahi. Demikian selanjutnya hingga satuan pendidikan merasa cukup sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dipunyai.
 - c. Rumusan identifikasi, refleksi, dan benahi ini adalah contoh. Satuan pendidikan dapat memilih satu atau lebih daftar yang ada, atau satuan pendidikan juga dapat memilih di luar daftar tersebut.
3. Akar masalah dari indikator level 1 dapat ditemukan dari indikator level 2 atau dimensi yang lain dan indikator dari dimensi lain yang capaiannya rendah. Misalnya: masalah dari Indikator A.1 dapat ditemukan dari indikator A.1.1 dan dari dimensi D (proses) dan dimensi C dan E (Input)

No	Permasalahan	Akar Masalah
1	Pilih indikator yang sudah ditetapkan di tahap identifikasi sebagai masalah yang akan diintervensi	Pilih indikator level 2 yang berkontribusi pada masalah di indikator level 1 Pilih indikator yang berpotensi sebagai penyebab masalah dari dimensi yang lain

Benahi

Tahapan Benahi dilakukan untuk merekomendasikan program atau kegiatan untuk mengatasi masalah yang muncul. Tahapan Benahi adalah sebagai berikut:

1. Dari akar masalah yang sudah dirumuskan, tentukan program untuk menyelesaikan akar masalah yang teridentifikasi.
2. Penentuan program dan kegiatan dapat merujuk pada contoh program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Kemdikbudristek.
3. Pilihlah benahi yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas satpen.
4. Pilihlah program yang memiliki potensi dampak paling tinggi untuk mengatasi akar masalah dengan anggaran seefisien mungkin.

No	Akar Masalah	Program dan Kegiatan
1	Pilih akar masalah dari tahap refleksi	Tentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah

Rencana Kerja Tahunan

1. Format RKT ini adalah bentuk yang lebih sederhana dari format RKT yang ada sebelumnya.
2. Sedang didiskusikan untuk membuat format RKT digital yang akan ditempatkan di platform ARKAS.

No	Identifikasi	Refleksi	Benahi
	Masalah	Akar Masalah	Program dan Kegiatan

D. RKAS

1. Satuan pendidikan memilih program dan kegiatan di dalam RKT yang akan dibiayai pada tahun perencanaan tersebut
2. Program dan kegiatan tersebut dicarikan bentuk kegiatannya dalam ARKAS. Jika tidak ditemukan, dapat diusulkan agar dimasukkan dalam ARKAS.
3. Kegiatan yang terpilih dimasukkan di format RKAS. Terdapat tiga pilihan format RKAS:
 - a. Jika satuan pendidikan sudah menerapkan ARKAS, dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut
 - b. Jika satuan pendidikan menerapkan aplikasi RKAS diluar ARKAS, maka dapat menggunakan aplikasi yang tersedia dan diharapkan dapat bermigrasi

ke ARKAS

- c. Jika satuan pendidikan belum menggunakan aplikasi, sekolah dapat menggunakan format RKAS manual dan diharapkan dapat bermigrasi ke ARKAS

Format ARKAS

Program	Sub-Program	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Satuan biaya	Jumlah
Masukkan program (SNP)	Masukkan sub program	Pilih kegiatan dalam RKAS	Item biaya	jumlah	Satuan biaya	rupiah	Total

Contoh Perencanaan Berbasis Data

1. Perumusan identifikasi, refleksi, benahi berikut dapat digunakan oleh satuan pendidikan sebagai referensi dalam dalam menyusun perencanaan berbasis data
2. Langkah yang bisa dilakukan:
 - a. Pilihlah satu masalah dari daftar identifikasi. Kemudian, pilih satu akar masalah yang menyebabkan masalah itu terjadi dari daftar refleksi. Dari akar masalah tersebut, pilih satu atau lebih kegiatan dari daftar benahi.
 - b. Jika satuan pendidikan ingin menambah akar masalah lain, pilih satu lagi akar masalah dari daftar refleksi dan selanjutnya pilih kegiatan dari daftar benahi. Demikian selanjutnya hingga satuan pendidikan merasa cukup sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dipunyai.
3. Rumusan identifikasi, refleksi, dan benahi ini adalah contoh. Satuan pendidikan dapat memilih satu atau lebih daftar yang ada, atau satuan pendidikan juga dapat memilih di luar daftar tersebut.

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)
A.1 Kemampuan literasi	<p>A.1. Sebagian besar siswa dalam kategori perlu intervensi khusus dan dasar terutama dalam hal membaca teks informasi, membaca teks sastra, mengakses dan menemukan isi teks, menginterpretasi dan memahami isi teks, dan Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks</p> <p>D.1. Kualitas pembelajaran kurang baik D.2. Kemampuan guru melakukan refleksi masih rendah D.3. Kepemimpinan instruksional belum baik</p>
A.2 Kemampuan numerasi	<p>A.2. Sebagian besar siswa dalam kategori perlu intervensi khusus dan dasar terutama dalam hal Domain bilangan, Aljabar, Geometri, Data dan ketidakpastian, Kompetensi mengetahui, Kompetensi menerapkan, dan Kompetensi menalar</p> <p>D.1. Kualitas pembelajaran kurang baik D.2. Kemampuan guru melakukan refleksi masih rendah D.3. Kepemimpinan instruksional belum baik</p>
A.3 Indeks Karakter	<p>A.3.1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia masih kurang A.3.2. Gotong royong masih rendah A.3.3. Kreativitas masih rendah A.3.4. Nalar kritis masih kurang A.3.5. Kebhinekaan global masih rendah A.3.6. Kemandirian masih rendah</p> <p>D.1. Kualitas pembelajaran kurang baik D.2. Kemampuan guru melakukan refleksi masih rendah D.3. Kepemimpinan instruksional belum baik</p>
D.4 Iklim Keamanan Sekolah	<p>D.4.1 Kesejahteraan psikologis siswa masih rendah D.4.2 Kesejahteraan psikologis guru masih rendah D.4.3 Perundungan masih tinggi D.4.4 Hukuman fisik masih tinggi D.4.5 Kekerasan seksual masih tinggi D.4.6 Narkoba masih tinggi</p>
D.8 Iklim Kebhinekaan	<p>D.8.1. Toleransi agama dan budaya masih rendah D.8.2. Sikap inklusif masih rendah D.8.3. Dukungan atas kesetaraan agama dan budaya masih kurang D.8.4. Komitmen Kebangsaan masih rendah</p>

Terdapat sepuluh benahi yang sudah dirumuskan untuk menyelesaikan masalah dan akar masalah di atas.

Sepuluh benahi tersebut adalah:

No	Benahi
1	Pemanfaatan platform merdeka mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah
2	Penguatan pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform merdeka mengajar
3	Kegiatan membaca dan mendiskusikan beragam buku dari berbagai sumber dan genre secara rutin oleh guru dan siswa
4	Pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagi pengetahuan dan diskusi
5	Refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah
6	Penyusunan dan Penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah, contohnya, dengan penerapan kurikulum merdeka atau kurikulum darurat
7	Pelatihan guru dan kepala sekolah serta pembelajaran terkait Kesejahteraan psikologis siswa atau guru
8	Sekolah mengadopsi program ROOTS untuk pencegahan perundungan
9	Pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah
10	Kegiatan pembelajaran dengan menonton dan diskusi

2. Identifikasi, Refleksi dan Benahi pada Satuan Pendidikan PAUD

Salah satu upaya untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas adalah melalui perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel di tingkat satuan pendidikan. Dalam mencapai tujuan tersebut, satuan PAUD perlu melakukan perencanaan berbasis data (PBD) untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana maupun anggaran, dapat

dikelola dengan baik sehingga menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas.

Sebagaimana sudah dijelaskan di Bab 3, indikator yang ada di dalam dimensi D dan E perlu dimaknai sebagai indikator kinerja. PBD adalah mekanisme yang dapat dilalui oleh satuan PAUD untuk memenuhi indikator kinerja tersebut. Dalam upaya peningkatan kualitas layanan melalui PBD, ada beberapa prinsip yang perlu menjadi catatan:

1. Pemenuhan indikator kinerja perlu dimaknai sebagai proses perjalanan satuan PAUD dalam upayanya menyediakan layanan berkualitas. Indikator sukses adalah terjadinya kemajuan (progress).
2. Satuan PAUD dapat menerapkan laju yang berbeda dalam memenuhi indikator layanan PAUD berkualitas serta fokus pemenuhan indikator kinerja yang berbeda yang selaras dengan visi misi, kapasitas dan karakteristik satuan. Artinya, setiap satuan PAUD dapat menentukan proses perjalanannya (learning journey) sendiri.
3. Proses perjalanan satuan PAUD dalam menyediakan layanan berkualitas ini dipandu menggunakan kerangka Perencanaan Berbasis Data (PBD). PBD merupakan bagian dari evaluasi sistem internal yang termaktub dalam Evaluasi Sistem Pendidikan (Permendikbudristek No 9 Tahun 2022).
4. Terdapat 3 langkah utama dalam proses perencanaan tersebut, yaitu: melakukan identifikasi masalah berdasarkan kondisi di satuan pendidikan (Identifikasi), melakukan refleksi atas capaian dan proses pembelajaran di satuan (Refleksi), dan melakukan pembenahan untuk mencapai indikator layanan PAUD berkualitas (Benahi). Khusus untuk PAUD, proses Identifikasi dimulai dengan Evaluasi Diri.
5. Semua langkah tersebut merupakan bagian dari budaya refleksi dan perbaikan layanan yang tercermin di dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) serta Rencana Kegiatan Anggaran Satuan (RKAS). Perencanaan ini yang akan memandu upaya perbaikan satuan dalam kurun waktu satu tahun. Melalui proses ini, kapasitas perencanaan satuan akan terus terasah, anggaran digunakan secara akuntabel, dan mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang partisipatif saat rangkaian langkah ini dilakukan oleh berbagai pihak di satuan PAUD (Kepala satuan, pendidik, komite satuan, bahkan dapat saja melibatkan pengawas/penilik).

Tujuan Utama dan Manfaat PBD bagi Satuan PAUD

Tujuan Utama: perubahan perilaku dalam perencanaan dan penganggaran

Manfaat PBD bagi satuan PAUD:

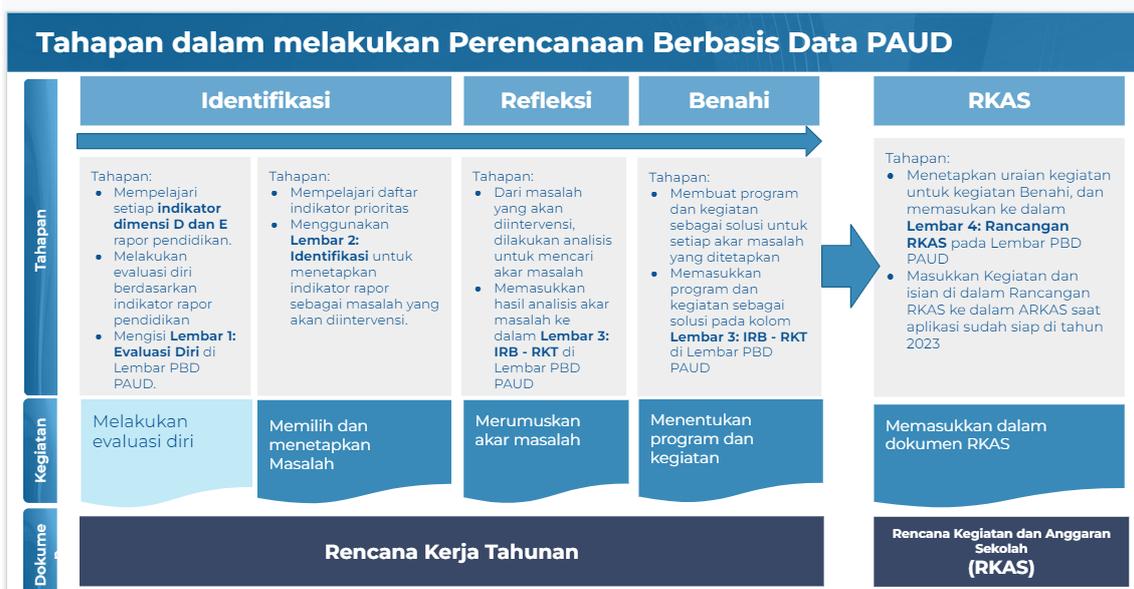
1. Membangun budaya refleksi dan peningkatan kapasitas satuan PAUD dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja Tahunan) dan anggaran (RKAS) melalui proses Identifikasi, Refleksi, Benahi.
2. Satuan PAUD lebih siap untuk menyampaikan rencana penggunaan anggarannya secara akuntabel melalui RKT dan RKAS di akhir tahun 2022. RKT dan RKAS yang sudah selesai disusun oleh satuan PAUD diinput ke dalam ARKAS di tahun 2023.
3. Meningkatkan kesiapan satuan PAUD untuk diakreditasi (karena konten akreditasi selaras dgn target kinerja di profil pendidikan).

Alur Pengerjaan PBD PAUD

Alur pengerjaan PBD untuk satuan PAUD adalah: Unduh → Isi → Simpan dan Terapkan → Laporkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Unduh Lembar PBD PAUD di Platform Rapor Pendidikan
2. Ikuti rangkaian proses penyusunan perencanaan dan rancangan penganggaran yang ada di dalam Lembar PBD PAUD. Setelah selesai, di titik ini, satuan PAUD sudah berhasil menyusun RKT dan rancangan RKAS melalui Perencanaan Berbasis Data untuk diterapkan di tahun 2023!
3. Simpan file RKT dan rancangan RKAS dan silahkan diterapkan di satuan PAUD untuk memandu upaya peningkatan kualitas layanan di tahun depan. Satuan PAUD juga perlu menyimpan file ini di wadah yang tersedia langsung di dalam Lembar PBD PAUD.
4. Saat ARKAS sudah siap, satuan PAUD dapat mengisi RKAS-nya serta melaporkan penggunaan BOP di dalam aplikasi tersebut.

Tahapan dalam melakukan PBD PAUD



Gambar Alur Perencanaan Berbasis Data di PAUD

Terdapat 3 langkah utama dalam proses ini, yaitu: melakukan identifikasi masalah berdasarkan kondisi di satuan pendidikan (Identifikasi), melakukan refleksi atas capaian dan proses pembelajaran di satuan (Refleksi), dan melakukan pembenahan untuk mencapai indikator layanan PAUD berkualitas (Benahi).

Semua langkah tersebut merupakan bagian dari budaya refleksi dan perbaikan layanan oleh satuan, dan hasilnya ditampilkan di dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) serta Rencana Kegiatan Anggaran Satuan (RKAS) yang akan menjadi dokumen rujukan dalam memandu upaya perbaikan satuan dalam kurun waktu satu tahun. Melalui proses ini, kapasitas perencanaan satuan akan terus terasah, anggaran digunakan secara akuntabel, dan mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang partisipatif saat rangkaian langkah ini dilakukan oleh berbagai pihak di satuan PAUD (Kepala satuan, pendidik, komite satuan, bahkan dapat saja melibatkan pengawas/penilik).

Untuk menyelesaikan seluruh proses ini, satuan PAUD dapat mengunduh Lembar PBD PAUD di website Rapor Pendidikan setelah mengaksesnya dengan menggunakan akun belajar.id (akses admin untuk Kepala Satuan). Setelah mengunduh, satuan dapat menyimpan file tersebut di link yang tersedia di Lembar PBD PAUD.

Tahapan Identifikasi

Di dalam tahapan identifikasi, ada dua langkah yang harus ditempuh: Evaluasi Diri dan Identifikasi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan identifikasi.

Pertama: satuan pendidikan melakukan evaluasi diri dengan mempelajari apa saja indikator kualitas layanan yang menjadi fokus evaluasi serta melakukan refleksi bagaimana praktik di satuan untuk masing-masing indikator tersebut. Dalam melakukan evaluasi diri, satuan PAUD akan melakukan identifikasi sejauh mana posisinya/capaiannya saat ini untuk indikator dimensi D dan E dengan menggunakan Lembar Evaluasi Diri yang ada di dalam Lembar PBD PAUD.

Kedua: setiap indikator kegiatan dan layanan dipercaya akan menghadirkan lingkungan belajar yang dapat memberikan manfaat optimal bagi setiap anak usia dini yang berpartisipasi di PAUD.

Ketiga: berdasarkan hasil evaluasi, satuan dapat melakukan identifikasi apa saja aspek layanan yang ingin dikuatkan. Ada empat indikator yang disarankan sebagai prioritas. Namun, satuan PAUD tetap dapat melakukan prioritas sesuai kebutuhannya.

Keempat: saat melakukan evaluasi diri, satuan dapat menggunakan kategorisasi yang sudah disiapkan sebagai panduan.

Evaluasi Diri

Khusus untuk satuan PAUD, proses PBD dimulai dengan melakukan evaluasi diri mengenai kondisi layanan di satuan PAUD. Hasil dari evaluasi diri digunakan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Satuan PAUD didorong untuk melakukan evaluasi diri secara jujur, karena tidak akan ada penilaian terhadap hasilnya oleh pihak eksternal. Hasil evaluasi diri murni digunakan untuk keperluan melakukan perencanaan dan penganggaran sumber daya yang berbasis kebutuhan. Evaluasi diri dapat diibaratkan berbagai pihak di dalam satuan PAUD sedang bercermin, memandang dan menerima diri apa adanya, dilakukan bersama-sama dengan warga sekolah (pihak yayasan, kepala sekolah, guru, dan bisa melibatkan pengawas/penilik atau pemangku kepentingan).

Dalam melakukan evaluasi diri, satuan PAUD akan melakukan identifikasi sejauh mana posisinya/capaiannya saat ini untuk indikator dimensi D dan E dengan menggunakan Lembar Evaluasi Diri yang ada di file Lembar PBD PAUD milik satuan. Hal penting lainnya, lembar evaluasi diri ini juga sekaligus bermanfaat sebagai instrumen refleksi dan bagi Kepala Satuan dan Guru

Evaluasi diri ini dilakukan oleh kepala sekolah bersama-sama dengan guru di satuan PAUD Anda. Akan sangat baik jika proses evaluasi ini juga melibatkan anggota komite sekolah ataupun pengawas/penilik

Satuan PAUD didorong untuk mengisi Lembar Evaluasi Diri sejujur-jujurnya sehingga mendapatkan gambaran kondisi nyata di sekolah masing-masing. Tidak akan ada penilaian terhadap hasil pengisian ini oleh pihak eksternal. Hasil Evaluasi Diri ini murni digunakan untuk melakukan perencanaan berbasis data dan membuat penganggaran sumber daya yang berbasis kebutuhan. Hasil Evaluasi Diri ini akan menentukan layanan mana yang akan disediakan atau dikuatkan melalui perencanaan dan penganggaran di dalam RKT dan RKAS.

Yang perlu diingat dalam melakukan Evaluasi Diri

Satu Visi: Indikator kinerja merujuk pada indikator dimensi D dan E (konsisten dengan kerangka PAUD Berkualitas, Transformasi Satuan PAUD dalam PSP dan akreditasi).

Hasil Evaluasi bukan Rapor Satpen. Hasil evaluasi diri tidak dimaknai sebagai data objektif, melainkan hasil refleksi kondisi satuan yang dipelajari bersama antara kepala satuan

Sebelum mengisi Lembar Evaluasi Diri ini, satuan PAUD perlu memahami layanan seperti apa yang perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya melalui indikator yang tertulis. Indikator Layanan Rapor Pendidikan dipercaya akan menghadirkan

lingkungan belajar yang dapat memberikan manfaat optimal bagi setiap anak usia dini yang berpartisipasi di PAUD.

Untuk mempermudah proses identifikasi, sudah disusun kategorisasi kondisi layanan yang dapat menjadi rujukan satuan.

Kategorisasi kondisi umumnya dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Prima: capaian sangat baik atau satuan telah memenuhi seluruh indikator disertai dokumen pendukung. Namun kata prima bukan berarti satuan tidak melakukan pembenahan dan perbaikan indikator menuju kualitas yang lebih baik. Terutama pada indikator yang menjadi prioritas. Perbaikan ini dimaksudkan agar peningkatan kualitas layanan berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Kondusif: capaian baik atau satuan mendukung berlangsungnya aktivitas dan berproses dalam pemenuhan indikator (merujuk pada pemenuhan indikator mencapai 80%) disertai dokumen pendukung
3. Pra kondusif: capaian cukup atau satuan melaksanakan pemenuhan sebagian dari indikator (merujuk pada pemenuhan indikator sebesar 50%) disertai dokumen pendukung
4. Perlu pengembangan: capaian kurang atau satuan melaksanakan pemenuhan sebagian kecil indikator (merujuk pada pemenuhan indikator sebesar kurang dari 50%), dan dokumen pendukung tidak lengkap.

Identifikasi

Jika sudah melakukan evaluasi hingga ke indikator terakhir di lembar ini, satuan PAUD dapat lanjut ke tahapan berikutnya (Identifikasi).

Langkah lebih rinci tersedia di dalam Lembar PBD PAUD (diunduh di Platform Rapor Pendidikan), dan juga Panduan PAUD Berkualitas Seri 5 tentang Perencanaan Berbasis Data. Link untuk mengakses Panduan tersedia di dalam Lembar PBD PAUD.

Identifikasi Capaian dan Indikator yang ingin dikuatkan

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan oleh satuan PAUD dapat menetapkan indikator yang ingin disediakan atau dikuatkan kualitasnya:

i) Agar upaya penyediaan dan peningkatan layanan lebih fokus, disarankan setiap satuan memilih maksimal 5 layanan yang perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Namun, apabila satuan PAUD merasa memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penguatan lebih dari 5 aspek layanan, maka dipersilakan untuk memilih lebih dari 5.

ii) Utamakan empat indikator prioritas

iii) Sebaiknya pilih indikator yang capaiannya belum baik.

Langkah lebih rinci tersedia di dalam Lembar PBD PAUD (diunduh di Platform Rapor Pendidikan), dan juga Panduan PAUD Berkualitas Seri 5 tentang Perencanaan Berbasis Data. Link untuk mengakses Panduan tersedia di dalam Lembar PBD PAUD.

Tahapan Refleksi

Di dalam tahapan refleksi, satuan pendidikan merumuskan akar masalah untuk setiap indikator yang dipilih. Tujuan dari proses ini adalah, saat satuan PAUD memilih kegiatan benahi untuk meningkatkan kualitas layanan, kegiatan yang dipilih dapat menjadi solusi dari akar masalah yang sudah diidentifikasi. Satuan PAUD dapat menggunakan Lembar PBD PAUD untuk memandu proses ini. Catatan: khusus untuk indikator prioritas, akar masalah dan benahi sudah ditentukan oleh Kemendikbud Ristek dan dimaknai sebagai satu paket keseluruhan.

Langkah lebih rinci tersedia di dalam Lembar PBD PAUD (diunduh di Platform Rapor Pendidikan), dan juga Panduan PAUD Berkualitas Seri 5 tentang Perencanaan Berbasis Data. Link untuk mengakses Panduan tersedia di dalam Lembar PBD PAUD.

Tahapan Benahi

Di dalam tahapan benahi, satuan pendidikan menentukan dan membuat program sebagai solusi dari setiap akar masalah, serta menetapkan target dan pengorganisasian kegiatan. Satuan PAUD dapat menggunakan Lembar PBD PAUD untuk memandu proses ini.

Catatan: khusus untuk indikator prioritas, akar masalah dan benahi sudah ditentukan oleh Kemendikbud Ristek dan dimaknai sebagai satu paket keseluruhan.

Setelah melengkapinya kegiatan Benahi, satuan perlu cek kembali kesinambungan dari hasil perencanaan di satuan anda, dimulai dari kolom Identifikasi, Refleksi dan Benahi. Apabila sudah sesuai, satuan PAUD dapat memetakan kegiatan benahi mana yang memerlukan anggaran. Kegiatan (Kode) RKAS Kegiatan tersedia di dalam dropdown list untuk dipilih oleh satuan PAUD.

Yang perlu dipahami oleh satuan PAUD:

Catatan 1. tidak berarti setiap Kegiatan Benahi memerlukan anggaran.

Catatan 2. Untuk Benahi yang prioritas, maka Kode Kegiatan sudah disediakan di dalam Lembar

Catatan 3. Yang diutamakan adalah kegiatan yang

Langkah lebih rinci tersedia di dalam Lembar PBD PAUD.

Tahapan Rancangan RKAS

Selanjutnya satuan PAUD perlu menyusun Rancangan RKAS di dalam Lembar PBD PAUD. Fungsi dari tahapan ini adalah membantu satuan PAUD merencanakan penggunaan kegiatan yang memerlukan anggaran dengan lebih rinci. Informasi di dalam lembar ini nantinya dapat menjadi rujukan saat satuan PAUD melakukan entri rencana kegiatan dan anggaran ke dalam ARKAS di tahun 2023.

Yang perlu dipahami oleh satuan PAUD:

1. Satuan cukup memasukkan Kegiatan yang telah ditetapkan melalui pengisian Lembar PBD ke dalam ARKAS.
2. **Kegiatan sebagai elemen penghubung.** Satuan PAUD cukup memasukkan Kegiatan serta rincian pembiayaannya ke dalam ARKAS. Artinya, saat satuan memetakan Kegiatan Benahi yang disusun melalui PBD dengan Kode Kegiatan ARKAS, satuan sudah berhasil menyambungkan antara perencanaan untuk

peningkatan kualitas layanan dengan pengelolaan keuangan. Selama ini, dua hal ini seperti terputus padahal RKAS seharusnya merupakan penjabaran finansial dari dokumen perencanaan. Dengan demikian, harapannya, setiap penggunaan sumber daya, utamanya BOP, digunakan secara lebih tepat guna.

3. **ARKAS sudah memetakan kode dan kegiatan dengan kode rekening belanja dari Permendagri.** Satuan PAUD cukup memilih (Kode) Kegiatan yang sudah diidentifikasi melalui PBD, lalu kemudian memilih rekening belanjanya (pengadaan barang/jasanya).

Setelah mengisi Rancangan RKAS, di titik ini, satuan PAUD sudah memiliki rancangan RKAS dan dapat dimasukkan ke dalam ARKAS di tahun 2023.

A. Identifikasi, Refleksi dan Benahi pada Pemerintah Daerah

Pada bagian ini, Anda diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan untuk mengatasi masalah pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.

Perencanaan berbasis data membantu pemerintah daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan. Praktik perencanaan tanpa berdasarkan analisis data kondisi mutu seperti menyalin perencanaan tahun sebelumnya, berdasarkan opini atau kebutuhan rutin saja atau kegiatan yang tidak menyelesaikan masalah harus ditinggalkan. Kebiasaan baru yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Menggunakan data dari Profil Pendidikan yang ditampilkan melalui platform Rapor Pendidikan untuk melakukan identifikasi kondisi dan tantangan yang dihadapi (identifikasi masalah)
2. Melakukan refleksi diri untuk menemukan akar masalah dari tantangan/masalah yang dihadapi menggunakan indikator-indikator yang tertera dalam Profil Pendidikan
3. Menyusun program kegiatan yang dapat menyelesaikan akar masalah tersebut secara efektif dan efisien, menetapkan target, dan memasukkannya di dalam dokumen perencanaan

4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Melakukan pendampingan yang menyeluruh dan berkelanjutan
5. Monitoring dan evaluasi untuk melihat keterlaksanaan kegiatan dan melihat dampak perubahan capaian di Rapor Pendidikan di tahun berikutnya

Lima kegiatan diatas perlu dilakukan secara konsisten sehingga proses perbaikan mutu pendidikan yang berkelanjutan menjadi membudaya.

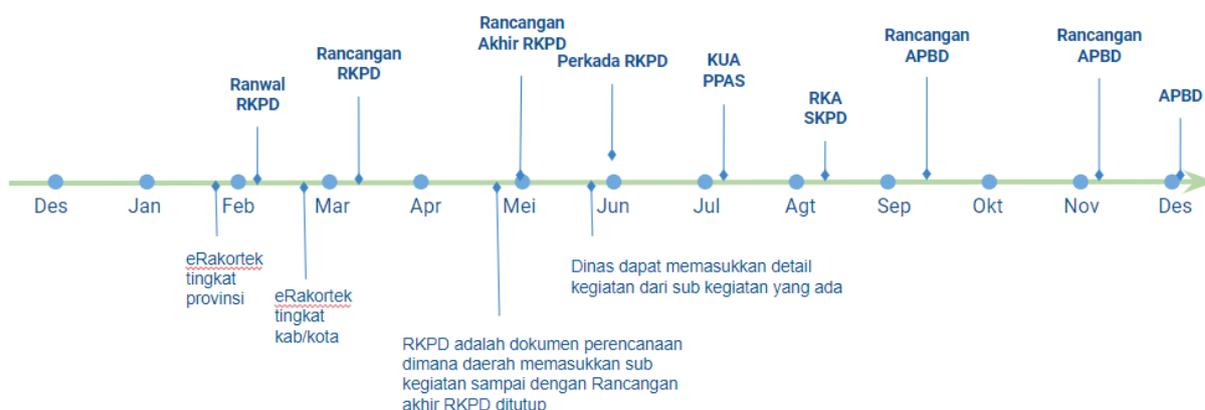
Proses perencanaan berbasis data dilakukan dalam 3 tahap yaitu:

1. Identifikasi
2. Refleksi
3. Benahi

Agar dapat melakukan identifikasi dan refleksi dengan baik, diharapkan Anda telah memahami makna indikator-indikator yang ada dalam Profil Pendidikan, yaitu definisi indikator, nilai capaian indikator, definisi capaian, dan hubungan sebab akibat dari tiap indikator baik dalam dimensi yang sama maupun antara dimensi yang berbeda.

Hasil Identifikasi, Refleksi dan Benahi ini menjadi dokumen Rencana Kerja Tahunan dimana program/kegiatan dalam benahi menjadi dasar perencanaan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dimasukkan melalui Sistem Implementasi Perencanaan Daerah (SIPD) dalam forum Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang difasilitasi oleh Kemendagri untuk tingkat Provinsi dan Bappeda Provinsi untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Berikut linimasa perencanaan dan penganggaran daerah:



Gambar Linimasa perencanaan dan penganggaran daerah

Pemerintah daerah wajib mengutamakan pemenuhan indikator yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal sesuai Permendagri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berikut indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota:

Kelompok Indikator	Indikator Kinerja Urusan Provinsi
1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) 2. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
2 Kualitas Hasil Belajar	3. Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan AN 4. Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan AN 5. Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan AN 6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan AN 7. Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan AN 8. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan AN 9. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan AN 10. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan AN 11. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan AN 12. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan AN
3 Kualitas Lulusan SMK	13. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK 14. Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK.

Kelompok Indikator	Indikator Kinerja Urusan Kab/Kota
1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) 2. Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
2 Kualitas Hasil Belajar	3. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 4. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 5. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
3 PAUD	7. Jumlah Satuan Paud yg mendapatkan min. akreditasi B 8. Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV 9. Rasio pengawas dan penilik PAUD

Perumusan berikut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai referensi pemenuhan minimal dalam memilih masalah, merumuskan akar masalah dan menetapkan kegiatan yang akan dilakukan. Pemerintah daerah memprioritaskan perumusan pemenuhan pelayanan minimal ini untuk dipilih dalam perencanaan daerah.

Jika suatu daerah pemenuhan SPM nya sudah tercapai dan mempunyai kemampuan keuangan lebih, maka dapat menambahkan kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah di luar yang ditetapkan dalam pemenuhan minimal ini.

Seluruh kegiatan dan anggaran dimasukkan ke dalam format RKA RKPD dalam aplikasi SIPD. Kegiatan benahi dimasukkan dalam kolom “Dukungan Sub Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah” lengkap dengan estimasi PAGU anggaran yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Berikut format RKA RKPD tersebut:

No	Urusan	Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah	Target Daerah	
					2022	2023		2022	2023
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%		100	76.28	84.78	85.12

Lanjut ke kolom berikutnya

Dukungan Sub Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah	Catatan Daerah	Catatan K/L	Catatan Bangsa	Catatan Bappenas	Kesepakatan Pembahasan	Kesepakatan Rencana Target Daerah

Dalam kolom “Dukungan Sub Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah” terdapat kolom isian sebagai berikut:

Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target	Satuan	Pagu
1.01.02.1.03.02-Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	6	ruang	1.277.304.000,00

Indikator: Angka Partisipasi Sekolah jenjang Dasar dan Menengah

Tahap 1: Identifikasi

Pendidikan merupakan hak seluruh warga Indonesia, setiap anak usia sekolah berhak dan wajib bersekolah. Apabila indikator Angka Partisipasi Sekolah masih dibawah 100% berarti masih ada anak usia sekolah yang belum bersekolah.

Tahap 2: Refleksi

Pemerintah daerah perlu mengumpulkan data jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah, berupa nama, alamat tinggal dan alasan mengapa mereka tidak bersekolah. Terdapat 3 (tiga) alasan utama (akar masalah) mengapa anak tidak bersekolah:

1. Jumlah ruang kelas dan/atau sekolah belum mencukupi
2. Kendala biaya
3. Isu sosial, budaya, atau adat istiadat (anak membantu mencari nafkah orang tua, pernikahan dini, persepsi orang tua tentang pentingnya Pendidikan, dan lain-lain)

Tahap 3: Benahi

Pemerintah daerah perlu mencari solusi berupa program kegiatan yang dapat mengatasi tiap akar masalah tersebut diatas.

Berikut adalah kegiatan yang dipilih dari nomenklatur kodefikasi sub kegiatan berdasarkan Kepemendagri nomor 50-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai target	Belum tersedianya data jumlah anak usia 16-18 tahun dan 4-18 tahun yang tidak bersekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan warga negara usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah • Pendataan warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah
	Jumlah kelas/sekolah kurang dibandingkan jumlah anak usia sekolah	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, terutama di wilayah 3T
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Peserta didik terkendala biaya personil	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu	

Kolom deskripsi kegiatan adalah penjelasan lebih spesifik terhadap Nomenklatur Sub Kegiatan.

Agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan, Kemendikbudristek telah menyusun deskripsi kegiatan dari setiap kegiatan tersebut disertai dengan rujukan dokumen dan tautan dokumen atau informasi. Setiap kegiatan yang disusun merupakan kegiatan yang sudah pernah diimplementasikan oleh Kemendikbudristek.

Pemerintah daerah dapat mencontoh kegiatan tersebut dan melakukan modifikasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing jika diperlukan. Deskripsi kegiatan yang lebih rinci untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dapat dipelajari

pada materi Perencanaan Berbasis Data Pemda pada halaman 44/85 sampai dengan 49/89.

Indikator: Kualitas Hasil Belajar – Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi

Tahap 1: Identifikasi

Literasi dan numerasi adalah fondasi kemampuan belajar. Kemampuan literasi dan numerasi meningkatkan daya saing di era berbasis teknologi dan digital terutama di kancah internasional. Mampu menyaring informasi yang valid dengan hoax yang beredar.

Terdapat 4 (empat) tingkat kompetensi untuk kompetensi literasi dan numerasi, yaitu:

1. Mahir
2. Cakap
3. Dasar
4. Perlu Intervensi Khusus (PIK)

Nilai indeks menunjukkan proporsi murid pada tingkatan kompetensi literasi dan numerasi. Jika nilai indeks literasi atau numerasi 3.00 artinya seluruh murid tingkat literasi/numerasi adalah mahir. Jika nilai indeks literasi atau numerasi 1.00 artinya seluruh murid tingkat literasi/numerasi adalah perlu intervensi khusus.

Satuan Pendidikan dikategorikan sebagai mencapai kompetensi minimum jika nilai indeks minimum 1.8. Hal ini dapat dicapai apabila minimal 60% murid memiliki tingkat kompetensi cakap atau mahir. Artinya, untuk satuan pendidikan yang mencapai nilai indeks minimum, masih terdapat 40% murid yang kompetensi literasi/numerasi nya masih di tingkat dasar atau PIK.

Bagi satuan pendidikan yang telah mencapai nilai indeks sama dengan atau diatas 1.8 (minimal) tetap memiliki masalah literasi dan numerasi, dengan target meningkatkan murid yang masih ditingkat PIK dan dasar.

Tahap 2: Refleksi

Terdapat 6 (tiga) alasan utama (akar masalah) mengapa nilai indeks literasi/numerasi masih rendah:

1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan belum mencukupi
2. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum merata (secara total jumlah mencukupi, tetapi terdapat sekolah yang kekurangan dan terdapat yang kelebihan PTK)
3. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum baik (PTK tidak kompeten dalam pedagogik, penguasaan mata pelajaran, manajerial)
4. Kualitas proses pembelajaran belum baik
5. Iklim pembelajaran di sekolah belum kondusif (iklim keamanan dan kebinekaan)
6. Perlengkapan pembelajaran kurang memadai

Capaian indikator 1,2 dan 3 dapat dilihat dari dimensi C tentang Kompetensi dan Kinerja GTK, indikator 4, 5 dan 6 dapat dilihat dari dimensi D tentang Mutu dan Relevansi Pembelajaran.

Tahap 3: Benahi

Pemerintah daerah perlu mencari solusi berupa program kegiatan yang dapat mengatasi tiap akar masalah tersebut diatas.

Berikut adalah kegiatan yang dipilih dari nomenklatur kodefikasi sub kegiatan berdasarkan Kepemendagri nomor 50-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)	
Kemampuan literasi (A.1) dan numerasi rendah (A.2)	Data PTK belum terpetakan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	
	Distribusi PTK belum merata	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	
	Jumlah PTK belum mencukupi	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Pengajuan formasi guru ASN (PPPK) Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	
	Jumlah pengawas dan kepala sekolah yang berkualitas belum mencukupi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah (Atas/Kejuruan)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	
	Iklim keamanan sekolah masih perlu ditingkatkan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Perbaikan layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak
				Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Kemampuan literasi (A.1) dan numerasi rendah (A.2)	Kualitas PTK dan/atau kualitas proses pembelajaran perlu ditingkatkan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
			Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
			Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
	Perlengkapan pembelajaran belum mencukupi	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
			Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan
		Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan buku teks dan non teks	
		Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	

Kolom deskripsi kegiatan adalah penjelasan lebih spesifik terhadap Nomenklatur Sub Kegiatan.

Agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan, Kemendikbudristek telah menyusun deskripsi kegiatan dari setiap kegiatan tersebut disertai dengan rujukan dokumen dan tautan dokumen atau informasi. Setiap kegiatan yang disusun merupakan kegiatan yang sudah pernah diimplementasikan oleh Kemendikbudristek.

Pemerintah daerah dapat mencontoh kegiatan tersebut dan melakukan modifikasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing jika diperlukan. Deskripsi kegiatan yang lebih rinci untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dapat dipelajari pada materi Perencanaan Berbasis Data Pemda pada halaman 53/91 sampai dengan 69/109.

Indikator: Kualitas Lulusan SMK – Tingkat Penyerapan dan Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK

Tahap 1: Identifikasi

Tingkat penyerapan dan tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK merupakan indikator capaian hasil belajar jenjang SMK. Direktorat SMK mengembangkan sistem *Tracer Study* yang bertujuan untuk mengumpulkan data keterserapan dan tingkat kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK.

Target indikator tersebut ditetapkan minimal 52% tahun 2022 untuk tingkat penyerapan lulusan SMK dan 70.9% tahun 2022 untuk tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK. Pemerintah daerah dapat melakukan pengumpulan data jika diperlukan untuk mengetahui akar masalah dari rendahnya tingkat penyerapan dan tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK.

Tahap 2: Refleksi

Terdapat 3 (tiga) alasan utama (akar masalah) mengapa kualitas lulusan SMK masih rendah:

1. Kemitraan antara SMK dengan dunia kerja belum ada
2. Fasilitas peningkatan kompetensi lulusan belum tersedia
3. Sertifikasi kompetensi PTK dan peserta didik yang diakui oleh dunia kerja belum ada

Capaian indikator 1 dapat dilihat di indikator link and match dengan dunia kerja pada dimensi D tentang Mutu dan Relevansi Pembelajaran, indikator 3 dapat dilihat di indikator proporsi GTK yang bersertifikat kompetensi pada dimensi C tentang Kompetensi dan Kinerja GTK.

Tahap 3: Benahi

Pemerintah daerah perlu mencari solusi berupa program kegiatan yang dapat mengatasi tiap akar masalah tersebut diatas.

Berikut adalah kegiatan yang dipilih dari nomenklatur kodefikasi sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri nomor 50-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Data keterserapan lulusan belum tersedia	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan
	Kemitraan antara SMK dan dunia kerja belum terjalin	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja
	Fasilitas peningkatan kompetensi lulusan SMK belum tersedia	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Membangun Bengkel/Unit Produksi/Teaching Factory untuk mendukung penguatan kompetensi siswa dan kerjasama dengan industri
	Sertifikasi kompetensi PTK dan peserta didik masih rendah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK belum optimal	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi kelembagaan dan manajemen BKK dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan SMK

Kolom deskripsi kegiatan adalah penjelasan lebih spesifik terhadap Nomenklatur Sub Kegiatan.

Agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan, Kemendikbudristek telah menyusun deskripsi kegiatan dari setiap kegiatan tersebut disertai dengan rujukan dokumen dan tautan dokumen atau informasi. Setiap kegiatan yang disusun merupakan kegiatan yang sudah pernah diimplementasikan oleh Kemendikbudristek.

Pemerintah daerah dapat mencontoh kegiatan tersebut dan melakukan modifikasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing jika diperlukan. Deskripsi kegiatan yang lebih rinci untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dapat dipelajari pada materi Perencanaan Berbasis Data Pemda pada halaman 72 sampai dengan 76.

Indikator: Angka Partisipasi Sekolah PAUD

Tahap 1: Identifikasi

Pendidikan merupakan hak seluruh warga Indonesia, setiap anak usia sekolah berhak dan wajib bersekolah. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, artinya, pemerintah daerah perlu memastikan agar anak usia 5-6 tahun di daerahnya mendapatkan layanan

Pendidikan - baik layanan pendidikan di satuan PAUD, **ataupun** di sekolah dasar. Apabila indikator Angka Partisipasi Sekolah masih dibawah 100% berarti masih ada anak usia 5-6 tahun yang belum mendapatkan layanan Pendidikan.

Target ini dapat dimaknai sebagai **target transisi** menuju terpenuhinya angka partisipasi murni 5-6 tahun di PAUD, yang artinya, seluruh anak usia 5-6 tahun telah menikmati **setidaknya satu tahun pembelajaran di PAUD** sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Target ini selaras dengan konsensus internasional yang ada di dalam kesepakatan pembangunan dunia yang berkelanjutan atau dikenal dengan “*Sustainable Development Goals*” (SDG). Target 4.2 adalah “*participation rate in organized learning (one year before the official primary school entry age)*”, yang artinya angka partisipasi di program belajar yang terorganisir (satu tahun sebelum usia masuk SD yang resmi). **Partisipasi di PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar dipercaya akan membantu anak bertumbuh kembang secara optimal serta memiliki fondasi yang diperlukan untuk mengikuti layanan pendidikan selanjutnya.**

Sebagai sebuah target transisi, harapannya pemenuhan angka partisipasi sekolah 5-6 tahun akan lebih mudah untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Tahap 2: Refleksi

Angka partisipasi yang rendah dapat berarti dua hal: i) tidak tercatatnya hasil kinerja di sumber pendataan; atau ii) memang jumlah anak usia 5-6 tahun yang tidak bersekolah cukup banyak.

Pemerintah kab/kota dapat melakukan refleksi apakah ada isu terkait pencatatan data yang mempengaruhi capaian angka partisipasi yang rendah. Misalnya, apakah setiap satuan PAUD memiliki ijin operasional sehingga data anak yang berpartisipasi di satuan PAUD tercatat sebagai capaian kinerja pemerintah kab/kota? apakah satuan PAUD secara rutin memutakhirkan data sehingga data peserta didiknya tercatat?

Apabila mekanisme pendataan berlangsung baik, maka yang mungkin terjadi adalah jumlah anak yang tidak bersekolah di daerah tersebut cukup banyak. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mengumpulkan data jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah, nama, alamat tinggal dan alasan mengapa mereka tidak bersekolah.

Terdapat 3 (tiga) alasan utama (akar masalah) mengapa anak tidak bersekolah:

1. Jumlah ruang kelas dan/atau sekolah belum mencukupi. Untuk ini, pemerintah kab/kota dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa ataupun kelurahan untuk identifikasi apakah masih ada 1 desa atau kelurahan yang belum memiliki PAUD. Sebagai catatan, setiap pembangunan PAUD baru akan membutuhkan biaya operasional sehingga pemerintah kab/kota perlu memastikan bahwa: a) jumlah anak 5-6 tahun memadai untuk pendirian PAUD baru; b) pembangunan PAUD baru memang berdasarkan kebutuhan (tidak ada PAUD lain di daerah tersebut); dan c) kesiapan sumber daya manusia untuk memfasilitasi layanan PAUD, dan sarana prasarana yang esensial.
2. Kendala biaya. Apabila sudah terdapat PAUD di desa atau kelurahan, maka perlu diidentifikasi berapa jumlah anak yang ingin mengikuti PAUD tapi berasal dari keluarga miskin
3. Masyarakat belum memahami pentingnya PAUD. Manfaat PAUD belum sepenuhnya dipahami oleh setiap keluarga, padahal PAUD menyediakan layanan pembelajaran yang menguatkan perkembangan sosial emosional, kognitif, fisik motorik, serta karakter sejak dini. PAUD adalah fondasi dari jenjang Pendidikan dasar, dan membantu agar anak lebih siap saat menerima layanan pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Pemerintah daerah perlu melakukan kampanye dan sosialisasi manfaat PAUD sehingga dipahami oleh setiap keluarga. Dalam melakukan kampanye dan sosialisasi, pemerintah daerah dapat bermitra dengan Kelompok Kerja Bunda PAUD, organisasi mitra, serta unit lain yang tergabung di dalam Gugus Tugas PAUDHI.

Tahap 3: Benahi

Pemerintah daerah perlu mencari solusi berupa program kegiatan yang dapat mengatasi tiap akar masalah tersebut diatas.

Berikut adalah kegiatan yang dipilih dari nomenklatur kodefikasi sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri nomor 50-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Jumlah Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS 5-6 tahun)	Data anak usia dini yang belum bersekolah belum tersedia	Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
	Jumlah layanan PAUD belum memadai	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung, terutama di wilayah 3T
	Jumlah anak PAUD dari keluarga miskin yang terkendala biaya	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Penyediaan biaya personil peserta didik	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan

Kolom deskripsi kegiatan adalah penjelasan lebih spesifik terhadap Nomenklatur Sub Kegiatan.

Agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan, Kemendikbudristek telah menyusun deskripsi kegiatan dari setiap kegiatan tersebut disertai dengan rujukan dokumen dan tautan dokumen atau informasi. Setiap kegiatan yang disusun merupakan kegiatan yang sudah pernah diimplementasikan oleh Kemendikbudristek.

Pemerintah daerah dapat mencontoh kegiatan tersebut dan melakukan modifikasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing jika diperlukan. Deskripsi kegiatan yang lebih rinci serta kerangka berpikir untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dapat dipelajari pada materi Perencanaan Berbasis Data Pemda pada **halaman 114 sampai dengan 118**.

Indikator: Proporsi Satuan PAUD Berakreditasi minimal B,

Tahap 1: Identifikasi

PAUD adalah pijakan pertama anak di dunia pendidikan dan titik awal perjalanannya dalam berkembang dan berperan di masyarakat, negara, dan dunia. Sebagai pijakan pertama, maka pengalaman anak di PAUD sangatlah penting. Apabila pengalaman belajar yang mereka alami di PAUD tidak menyenangkan, maka tidak akan ada rasa positif terhadap belajar yang menjadi bekal mereka dalam melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Kualitas layanan yang diterimanya juga menentukan apakah pengalaman tersebut berhasil mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini yang merupakan kesempatan yang tak dapat kembali.

Dengan demikian, pada saat menyerukan “ayo ke PAUD”, maka terdapat makna tersirat di dalamnya bahwa anak perlu mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Satuan PAUD serta pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan layanan PAUD, sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, perlu mewujudkan hal tersebut.

Akreditasi adalah evaluasi eksternal yang dilakukan kepada satuan PAUD, untuk memastikan tersedianya lingkungan belajar yang berkualitas. Di dalam Indikator Rapor Pendidikan, kualitas layanan sudah dijabarkan menjadi seperangkat indikator yang ada di dimensi D (kualitas proses pembelajaran) dan Dimensi E (kualitas pengelolaan), dan seperangkat indikator ini tidak hanya menjadi rujukan satuan PAUD dalam melakukan evaluasi diri, namun juga dalam penyusunan instrumen akreditasi. Artinya, saat satuan PAUD mendapatkan status akreditasi B, maka satuan tersebut sudah mampu menjadi satuan PAUD berkualitas.

Satuan PAUD yang berkualitas adalah satuan yang mampu memfokuskan layanannya kepada empat elemen: kualitas proses pembelajaran (dimensi D); kemitraan dengan orang tua; mendukung pemenuhan layanan esensial untuk anak usia dini; dan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya (ketiga ini terpayungi di dalam dimensi E).

Pemerintah kab/kota perlu meninjau proporsi satuan PAUD di wilayahnya yang mendapatkan status akreditasi B. Mengingat kuota akreditasi terbatas dan ditentukan oleh pemerintah pusat, maka yang menjadi fokus adalah **peningkatan proporsi** jumlah satuan PAUD yang mendapatkan status akreditasi B dibagi dengan jumlah satuan PAUD yang telah terakreditasi (secara akumulatif).

Pemerintah kab/kota didorong untuk menguatkan kinerjanya dalam mendampingi setiap satuan PAUD sehingga saat diakreditasi menjadi lebih siap dan mendapatkan status akreditasi B.

Tahap 2: Refleksi

Pemerintah daerah perlu melakukan refleksi dengan menggunakan tiga pertanyaan berikut dalam merancang kegiatan benahi untuk pencapaian target kinerja proporsi satuan PAUD terakreditasi B:

1. Apakah anda dan satuan PAUD sudah memahami apa yang dimaksud dengan layanan PAUD berkualitas?

Untuk memandu pemahaman, dinas dapat merujuk pada indikator Rapor Pendidikan dimensi D dan E serta Pedoman tentang penyelenggaraan PAUD yang dikeluarkan oleh Kementerian.

2. Apakah kondisi kualitas lingkungan belajar PAUD di daerah anda baik?

Untuk mendapatkan data ini, dapat berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait di daerah anda. Proporsi satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B dapat menjadi proksi kualitas lingkungan belajar di daerah anda.

3. Bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang ada di satuan PAUD di daerah anda?

Apakah tenaga kependidikan dan pendidik di satuan PAUD sudah mendapatkan pembinaan kompetensi yang memadai agar dapat memfasilitasi pembelajaran dan layanan lain di PAUD? Salah satu proksi kompetensi adalah kualifikasi akademik, namun Anda juga dapat mengupayakan setiap pendidik di PAUD sudah mendapatkan pelatihan tentang PAUD yang diselenggarakan oleh kementerian, seperti diklat berjenjang atau mengakses berbagai sumber pembelajaran di Platform Merdeka Mengajar.

Tahap 3: Benahi

- Pemerintah daerah perlu mencari solusi berupa program kegiatan yang dapat mengatasi tiap akar masalah tersebut diatas.

Berikut adalah kegiatan yang dipilih dari nomenklatur kodefikasi sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri nomor 50-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)	
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Satuan PAUD belum mengerti kualitas layanan PAUD	Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan	Sosialisasi kepada satuan pendidikan paling sedikit mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi pentingnya proses pembelajaran dan pengelolaan yang berkualitas, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini	
	Kualitas PTK masih rendah	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
				Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
				Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
				Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas/penilik sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
				Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan
				Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
	Kualitas lingkungan belajar PAUD dalam kondisi belum memadai	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				

Pemerintah daerah dapat mencontoh kegiatan tersebut dan melakukan modifikasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing jika diperlukan. Sebagai contoh, Pemerintah daerah dapat melakukan kampanye dan sosialisasi manfaat PAUD sehingga dipahami oleh setiap keluarga. Dalam melakukan kampanye dan sosialisasi, pemerintah daerah dapat bermitra dengan Kelompok Kerja Bunda PAUD, organisasi mitra, serta unit lain yang tergabung di dalam Gugus Tugas PAUDHI.

Deskripsi kegiatan yang lebih rinci untuk peningkatan proporsi satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B dapat dipelajari pada materi Perencanaan Berbasis Data Pemda pada **halaman 124 sampai dengan 131**.

Indikator: tingkat pertumbuhan pendidik S1 dan D4

Tahap 1: Identifikasi

Fondasi dari layanan PAUD adalah sumber daya yang berkualitas. Tanpa adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten, bagaimana peserta didik akan mendapatkan layanan yang baik? Karenanya, setiap penyelenggara layanan harus memastikan sudah memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi untuk menjalankan kegiatan serta visi misi satuan sehingga setiap peserta didik dapat mencapai profil yang diharapkan di akhir partisipasinya.

Kualifikasi akademik adalah **proksi** kepemilikan kompetensi. Asumsinya, saat individu sudah memiliki kualifikasi akademik, maka individu tersebut memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Untuk konteks PAUD formal, sesuai dengan amanah UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta UU Guru dan Dosen, kualifikasi akademik minimal yang perlu dimiliki seorang guru di Pendidikan formal, termasuk satuan PAUD formal (Taman Kanak) adalah S1/D4. Selaras dengan kerangka regulasi tersebut, pemerintah kab/kota perlu memantau pertumbuhan guru TK di daerahnya yang sudah memiliki kualifikasi akademik tersebut

Namun ada beberapa **catatan penting** dalam memaknai indikator terkait kualifikasi ini ini:

1. Kualifikasi akademik adalah proksi dari kompetensi yang diterapkan di kerangka regulasi. Untuk memastikan agar setiap pendidik di PAUD mampu memfasilitasi layanan pendidikan dengan baik, maka peningkatan kompetensi bagi setiap pendidik di satuan PAUD, baik di satuan PAUD formal dan nonformal, perlu tetap dilakukan.

2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik PAUD dapat dilakukan secara bertahap dimulai dari mengikuti diklat berjenjang tingkat dasar, lanjut, dan mahir yang selanjutnya dapat melanjutkan ke jenjang S1 di perguruan tinggi sehingga durasi waktu untuk menyelesaikan S1 lebih singkat dengan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Tahap 2: Refleksi

Pemerintah kab/kota dapat melakukan refleksi terhadap akar permasalahan berikut apabila jumlah guru PAUD yang memiliki kualifikasi akademik S1/DIV di daerahnya rendah:

- a. Apakah di daerah terdapat perguruan tinggi terdekat yang memiliki program studi Pendidikan Anak Usia Dini atau Psikologi yang dapat diakses oleh pendidik Paud untuk mendapatkan kualifikasi akademik S1?
- b. Adakah lembaga penyelenggara diklat berjenjang tingkat dasar, lanjut, dan mahir yang dapat memfasilitasi pelaksanaan diklat berjenjang?
- c. Apakah ada perguruan tinggi yang sudah menerapkan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terhadap kepemilikan sertifikat dari diklat berjenjang?
- d. Apakah minat pengembangan karir guru PAUD rendah? Artinya, apakah kualifikasi akademik tidak dimaknai sebagai bekal bagi guru di satuan PAUD formal untuk mendapatkan kesejahteraan lebih baik? sudahkah semua guru memahami bahwa kualifikasi akademik adalah proksi kepemilikan kompetensi yang lebih baik dan diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran di PAUD?
- e. Apakah ada kesulitan sumber daya bagi pendidik untuk dapat mengikuti kualifikasi akademik?

Tahap 3: Benahi

Pemerintah daerah perlu mencari solusi berupa program kegiatan yang dapat mengatasi tiap akar masalah tersebut diatas.

Berikut adalah kegiatan yang dipilih dari nomenklatur kodefikasi sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri nomor 50-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



BAB
5

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENDIKBUDRISTEK

A. INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mempelajari arsitektur SPBE Kemendikbudristek peserta dapat, memahami dan menjelaskan tentang arsitektur SPBE Kemendikbudristek.

B. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus berlandaskan pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya pencapaian efektifitas dalam pelayanan publik, dapat ditempuh dengan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu

merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik. Sejalan dengan asas penyelenggaraan publik, tujuan dari penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu, yaitu sebagai berikut.

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Memperpendek proses pelayanan
4. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau
5. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan

Upaya peningkatan efektifitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu telah dimulai sejak 2010 yaitu saat pemerintah memperkenalkan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang dikenal sebagai generasi pertama layanan terpadu di Indonesia. Kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua. Yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah dan merupakan generasi pelayanan terpadu ketiga yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi system pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan pada MPP dikombinasikan dengan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang dihadapi dunia.

1. *E-Government* sebagai Langkah untuk Mencapai Efektifitas Pelayanan Publik

“Change is the law of life. And Those who look only to the past or the present are certain to miss the future”
(John F. Kennedy)

Sebagai ASN kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan setiap perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang mutlak tanpa terkecuali jika tidak ingin kehilangan peluang di masa yang akan datang. Konsep tersebut tidak hanya berlaku pada individu namun juga berlaku pada pemerintah. Birokrasi pemerintah perlu terus melakukan perubahan dan pembenahan dalam melakukan tugasnya yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam merespon perubahan global, tidak hanya teknologi saja yang semakin maju, namun masyarakat juga menjadi semakin modern. Indonesia mulai meninggalkan cara konvensional dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam menjalankan aktivitasnya seperti mencari informasi atau mendapatkan pelayanan.

Kecepatan dan ketepatan menjadi unsur penting dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Oleh karena itu, digitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi langkah nyata reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan stakeholdernya. Dengan adaptasi pelayanan publik ke bentuk digital dan virtual maka proses dan tata kelola pemerintah menjadi lebih strategis dalam mencapai *good governance*. Dimana pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, menopang pembangunan berkelanjutan serta menjawab harapan masyarakat.

Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan digitalisasi tata kelola atau dikenal dengan istilah *e-government* bagi penyelenggaraan negara bukan lagi suatu pilihan akan tetapi merupakan suatu keharusan.

Secara konseptual, konsep dasar dari *e-government* sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (*eservice*), seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer, serta multimedia. Melalui pengembangan *e-government* ini, maka sejalan dengan itu dilakukan pula penataan system manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

E-government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis dan Lembaga pemerintah yang lain.

Secara umum *e-government* didefinisikan sebagai pemerintahan elektronik (juga disebut digital government, online government atau transformational government). Yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, kalangan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. *E-government* dapat di aplikasikan pada legislative, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian utama adalah *Government to Citizen* atau *Government to Customer* (G2C), *Government to Business* (G2B) serta *Government to Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Implementasi konsep *e-government* secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu negara antara lain, sebagai berikut.

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para pemangku kepentingannya. Terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingannya untuk keperluan sehari-hari;

4. Memberi peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

2. Kebijakan terkait Pelayanan Publik Digital

Menjawab tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0 ini, penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan negara akan bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik seperti yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Implementasi *e-government* akan menekan praktik kecurangan dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap bahkan KKN. Seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan publik, maka menjadi tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan.

Upaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mulai serius digalakkan secara nasional. Termasuk dibuatnya kebijakan-kebijakan yang mendorong dan mengarahkan pada percepatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun sebenarnya embrio kebijakan pemanfaatan teknologi digital itu sendiri bukan barang baru di tanah air termasuk di kalangan birokrasi pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan terkait yang sebenarnya telah ada sejak lama.

Berikut adalah beberapa kebijakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam merealisasikan pelayanan publik berbasis digital:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pada pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Sistem pelayanan publik secara online diatur dalam UU ITE dan PP PSTE, yaitu kewajiban untuk menggunakan sistem yang andal dan sistem yang laik yang dibuktikan melalui sertifikasi.
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* sebagai upaya untuk mendukung penerapan *e-government* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan *good governance*. Kebijakan ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai panduan terkait *e-government* seperti Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah, Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah dan lainnya yang menjadi acuan bagi penyelenggara *e-government* di pusat dan daerah, kementerian/lembaga.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Peraturan ini merupakan dasar peluncuran aplikasi SIPPN oleh Kementerian PAN dan RB. Aplikasi ini dimaksudkan sebagai wadah informasi pelayanan publik semua instansi penyelenggaran pelayanan publik secara nasional mulai dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, lembaga non struktural dan BUMN/BUMD. Namun peran strategis SIPPN masih belum optimal karena belum semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan input data informasi pelayanan publik masing-masing instansinya ke aplikasi SIPPN tersebut.
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
Kehadiran peraturan presiden no 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau

manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi. Koordinator SPBE Kementerian adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. Pengelola SPBE Kementerian adalah unit kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.

SPBE Kemendikbudristek dilaksanakan dengan prinsip, sebagai berikut

- a. Efektivitas, efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- b. Keterpaduan, keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- c. Kestinambungan, Kestinambungan merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- d. Efisiensi, Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- e. Akuntabilitas, Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- f. Interoperabilitas, Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- g. Keamanan, keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Ruang lingkup SPBE Kemendikbudristek meliputi, sebagai berikut.

- a. Tata kelola SPBE Kementerian;
- b. Manajemen SPBE Kementerian;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE Kementerian; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

Unsur SPBE Kemendikbudristek meliputi, sebagai berikut.

- a. Arsitektur SPBE Kementerian;
- b. Peta Rencana SPBE Kementerian;
- c. Rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
- d. Proses Bisnis;
- e. Data dan informasi;
- f. Infrastruktur SPBE Kementerian;
- g. Aplikasi SPBE Kementerian;
- h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
- i. Layanan SPBE Kementerian.

Arsitektur SPBE Kemendikbudristek bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi, proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE Kementerian, Aplikasi SPBE Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian yang terpadu.

Arsitektur SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Kementerian.

Arsitektur SPBE Kementerian memuat:

- a. referensi arsitektur, yaitu mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- b. domain arsitektur, mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat: 1) domain arsitektur Proses Bisnis; 2) domain arsitektur data dan informasi; 3) domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian; 4) domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian; 5) domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian; dan 6) domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian.

BAB

6

PENUTUP

Permasalahan dalam menghadapi perubahan di lingkungan pekerjaan, lingkungan organisasi dan lingkungan strategis lainnya menuntut untuk dapat beradaptasi secara cepat dan tepat. Tututan tersebut berhubungan dengan permasalahan yang masih sering terjadi dalam individu maupun organisasi: pelayanan publik, permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dan masih lemahnya pengawasan serta permasalahan-permasalahan klasik lainnya yang terjadi di birokrasi pemerintah, merupakan permasalahan yang masih sering dijumpai, dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan.

Transformasi digital di birokrasi pemerintahan menjadi suatu keharusan. ASN secara individu pun diharapkan terus mengembangkan kompetensi untuk menjawab kesenjangan yang terjadi yang merupakan hak ASN agar dapat dimanfaatkan dan hasilnya diharapkan dapat berdampak, menjawab permasalahan yang ada.

Demikian juga Reformasi Birokrasi di Pemerintahan/Zona Integritas WBK/WBBM merupakan upaya pemerintah dalam menjawab permasalahan yang terjadi di birokrasi tersebut. Kemendikbudristek telah melaksanakan upaya yang maksimal sesuai *road map* dan kebijakan pembangunan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan kementerian, unit utama dan satuan teknis untuk menjawab permasalahan yang ada di birokrasi agar permasalahan-permasalahan baik yang sifatnya kongkrit atau abstrak, besar atau kecil, pada semua lini/area dapat diatasi dan diminimalisir terjadi.

Pelatihan ini sebagai salah satu jawaban terkecil dimaksudkan tidak hanya sekedar membantu menjawab dalam bentuk kognitif saja, lebih dari itu kolaborasi yang sudah dilaksanakan dalam pelatihan antar peserta, antar fasilitator dapat diaktualisasikan di unit kerja/satuan kerja sesuai dengan yang diharapkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia. (2021). *Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta.

Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). *Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact*. *MIS Quarterly*, 1165-1188

Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). *Big data: A survey*. *Mobile Network Application*. Pp. 171-209

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/03/kemendikbudristek-bersama-pemerintah-daerah-bersinergi-sukseskan-transformasi-digital-pendidikan/> pada tanggal 3 Maret 2023.

<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/dukung-transformasi-digital-pendidikan-tinggi-ditjen-diktiristek-luncurkan-empat-aplikasi-dan-satu-fasilitas-baru/> pada tanggal 3 Maret 2023.

<https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/sinergitas-transformasi-digital-kurikulum-merdeka-untuk-guru-dan-tenaga-kependidikan/> pada tanggal 3 Maret 2023.

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/pemanfaatan-data-bersama-satu-data-indonesia/ pada tanggal 3 Maret 2023.

<https://www.merdeka.com/jabar/big-data-adalah-kumpulan-informasi-yang-besar-dan-beragam-begini-cara-kerjanya-klm.html/> pada tanggal 3 Maret 2023.

<http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 3 Maret 2023

Modul Perencanaan Pendidikan (2023). Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.

Modul SAKIP (2023). Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.

Modul PKP (2021). Lembaga Administrasi Negara.

Modul PKA (2021). Lembaga Administrasi Negara.

Power, D. J. (2014). *Using 'Big Data' for analytics and decision support*. *Journal of Decision Systems*, 222-228

Putra, Ilham P. (2020). Belajar daring di PAUD kerap terkendala akses internet. Retrieved 11 November 2021, from <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/0k80mL2k-belajar-daring-dipaud-kerap-terkendala-akses-internet>.

Suwatno, H. (2022). *Pemanfaatan Big Data Dalam Membangun Jaringan Komunikasi Berbasis Perkantoran Digital (Digital Office)*/ pada tanggal 3 Maret 2023.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.